



BP BATAM
Badan Pengusahaan Batam

RENCANA STRATEGIS BP BATAM

2025-2029

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR KEPALA BP BATAM	III
KATA PENGANTAR WAKIL KEPALA BP BATAM	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	XI
1.1 KONDISI UMUM	1
1.1.1 <i>Capaian KPBPB Batam 2020- 2024</i>	2
1.1.2 <i>Capaian Renstra BP Batam 2020-2024</i>	5
1.1.3 <i>Tantangan Pengembangan KPBPB Batam 2025–2029</i>	11
1.1.3.1 Tantangan Kewilayahan KPBPB	11
1.1.3.2 Tantangan Kelembagaan BP Batam	13
1.1.4 <i>Aspirasi Pemangku Kepentingan</i>	13
1.1.5 <i>Target Ekonomi Makro KPBPB Batam 2025-2029</i>	15
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	19
1.2.1 <i>Potensi</i>	19
1.2.2 <i>Permasalahan</i>	24
1.2.3 <i>Analisis SWOT</i>	26
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	29
2.1 VISI	31
2.2 MISI	31
2.3 TUJUAN	32
2.4 SASARAN STRATEGIS	32
2.5 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAN INDIKASI RISIKO	32
2.6 SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	36
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	39
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	41
3.1.1 <i>Arah Kebijakan RPJPN dan RPJMN</i>	41
3.1.2 <i>Arah Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun</i>	47
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BP BATAM	50

3.2.1	<i>Arah Kebijakan BP Batam</i>	51
3.2.2	<i>Strategi BP Batam</i>	52
3.3	PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	53
3.3.1	<i>Wilayah Penataan dan Pengembangan</i>	54
3.3.2	<i>Proyek Strategis Nasional (PSN)</i>	56
3.4	SEKTOR PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR.....	59
3.5	KERANGKA REGULASI	74
3.6	KERANGKA KELEMBAGAAN	77
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		81
4.1	TARGET KINERJA	83
4.1.1	<i>Pelaksana Kinerja Program Pengembangan Kawasan Strategis</i>	88
4.1.2	<i>Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen</i>	93
4.2.	KERANGKA PENDANAAN	95
4.2.1.	<i>Kerangka Pendanaan sumber PNBPN</i>	95
4.2.2.	<i>Kerangka Pendanaan sumber Non-APBN</i>	97
4.3.	KERANGKA PENDANAAN PROGRAM BP BATAM	99
4.3.1.	<i>Kerangka Pendanaan Program Pengembangan Kawasan Strategis</i> ...	99
4.3.2.	<i>Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen</i>	100
BAB 5 PENUTUP		101
LAMPIRAN		105
<i>Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029</i>		
<i>Lampiran 2. Matriks Kegiatan Infrastruktur Prioritas BP Batam Pendanaan APBN dan Non-APBN Tahun 2025-2029</i>		
<i>Lampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029</i>		

KATA PENGANTAR

KEPALA BP BATAM

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BP Batam untuk periode lima tahun mendatang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Arah dan kebijakan pembangunan KPBPB Batam merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintang Karimun (Rinduk BBK).

Dokumen Renstra akan menjadi acuan bagi BP Batam dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam selama 5 (lima) tahun ke depan dalam tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan BP Batam antara lain dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dan Laporan Kinerja (LKj).

Akhirnya, atas izin Allah SWT serta upaya dari seluruh jajaran BP Batam dan pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini, kami mengucapkan terima kasih dan harapan untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan pencapaian seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BP Batam ini demi tercapainya kesuksesan program pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi yang maju dan berkelanjutan.

Batam, 10 Oktober 2025
Kepala Badan Pengusahaan Batam

Ttd.

Amsakar Achmad



KATA PENGANTAR

WAKIL KEPALA BP BATAM

Terima kasih atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BP Batam untuk tahun 2025-2029. Dokumen Renstra memberikan arah pencapaian kinerja BP Batam selama 5 tahun ke depan. Dengan target-target yang telah disusun bersama maka semestinya menjadi tanggung jawab bersama pula untuk mencapainya.

Adapun target realisasi investasi sebagai target kinerja utama BP Batam menunjukkan usaha BP Batam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk memenuhi arahan Bapak Presiden Prabowo yakni pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10% pada tahun 2029. Untuk memenuhi harapan ini maka kami berkomitmen menjadikan Batam sebagai Kota yang menarik untuk berinvestasi melalui kemudahan perizinan, penyelesaian permasalahan lahan, tata kota yang indah, serta peningkatan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dan pengusaha. Hal ini tentunya kami lakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan BP Batam selama 5 tahun. Target setiap unit telah dijabarkan, dan akan dievaluasi setiap tahun serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana tahunan, penganggaran, sampai evaluasi dan laporan kinerja.

Tentu saja kami menyadari bahwasanya dalam rangka pemenuhan target-target ini BP Batam mengharapkan peran semua pihak untuk bersinergi dalam rangka mewujudkan Visi BP Batam sebagai Kawasan Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan.

Batam, 10 Oktober 2025

Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam

Ttd.

Li Claudia Chandra



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKBPB Batam) yang selanjutnya disingkat BP Batam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta pendanaan dalam tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Renstra BP Batam 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Pada bagian awal Renstra BP Batam ini diuraikan kondisi umum yang merepresentasikan pencapaian sasaran pembangunan KPBPB Batam dan kinerja BP Batam selama tahun 2020-2024 serta tantangan pembangunan global dan regional dalam 5 (lima) tahun mendatang. Capaian tersebut menjadi pijakan untuk melakukan evaluasi mandiri atas langkah-langkah yang telah diambil pada kurun waktu 2020-2024 dan menjadi titik tolak dalam merumuskan kebijakan untuk periode 2025-2029.

Sebagai lembaga/instansi Pemerintah Pusat, BP Batam diberi mandat melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam. Disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BP Batam terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis dan merupakan harapan pemangku kepentingan kepada BP Batam yang akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra BP Batam 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, maka BP Batam telah merumuskan visi untuk tahun 2025 sampai 2029 adalah: *“Kawasan ekonomi yang maju dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”*. Untuk mewujudkan Visinya, BP Batam memiliki 2 (dua) misi, yaitu: 1) Menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan investasi bernilai tinggi; dan 2) Meningkatkan kinerja kelembagaan BP Batam yang efektif dan efisien. Untuk

mencapai visi dan misi tersebut, BP Batam menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu: 1) KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial; dan 2) Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun sasaran strategis dan indikatornya serta target kinerja disajikan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Sasaran Strategis (IKSS)		Satuan	Target Kinerja				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1	Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	Rp	46,29 T	52,31 T	59,56 T	68,23 T	78,56 T*
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan umum dan kawasan	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
		3	Nilai realisasi PNBK BP Batam	Rp	1,99 T	2,44 T	2,64 T	2,84 T	3,07 T**
3	Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA

**Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Program BP Batam
2025-2029**

Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus kepada BP Batam melalui pertemuan pada tanggal 13 Maret 2025 dan 22 Mei 2025 di Istana Negara Jakarta dan memberikan arahan agar pengembangan Batam mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga kesejahteraan masyarakat dapat digesa untuk meningkatkan daya saing KPBPB Batam. Hal tersebut sejalan dengan upaya Batam untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sesuai RPJMN 2025-2029. Adapun arahan Bapak Presiden yaitu sebagai berikut:

1. Mempercepat simplifikasi perizinan yang transparan dan akuntabel;
2. Melakukan penyelarasan terhadap berbagai regulasi yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan investasi;

3. Selesaikan persoalan kepemilikan lahan non produktif;
4. Mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang dengan tetap menjaga iklim investasi;
5. Optimalisasi sektor strategis seperti Kawasan Industri, galangan kapal, logistik untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional;
6. Jadikan Batam menarik sebagai destinasi investasi;
7. Kembangkan Batam menjadi kota yang indah, nyaman & menarik bagi penduduk serta pekerja; dan
8. Pengelolaan investasi Batam bisa memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Hal tersebut menjadi pemacu BP Batam sejalan dengan upaya Batam dalam meningkatkan realisasi investasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10 persen pada 2029. Upaya ini akan diterjemahkan menjadi strategi pembangunan KPBPB Batam yang akan ditempuh dalam tahun 2025 sampai dengan 2029 yaitu:

1. Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: *hub logistik internasional*, kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai tambah, digital dan kreatif, perdagangan internasional dan pusat keuangan, dan wisata kesehatan terpadu;
2. Pengembangan kawasan strategis prioritas di Batam dalam kerangka wilayah penataan dan pengembangan (WPP);
3. Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam;
5. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan berbasis teknologi informasi; dan
6. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

Dengan beberapa strategi pembangunan yang akan ditempuh diharapkan akan memberikan *output/outcome* yang dihasilkan meliputi:

1. Nilai realisasi investasi di KPBPB Batam terakumulasi selama lima tahun sebesar Rp304,9 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 10% pada tahun 2029;

2. Tercapainya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dan kawasan dengan predikat “sangat baik”;
3. Nilai realisasi PNB BP Batam selama lima tahun sebesar Rp13 triliun; dan
4. Tercapainya indeks reformasi birokrasi dengan predikat AA pada tahun 2029.

Selain itu, Renstra BP Batam memuat berbagai langkah (*measures*), baik langkah administratif (*administrative measures*) maupun langkah kebijakan (*policy measures*) yang diharapkan dapat mendukung suksesnya berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2025-2029.

Pada akhirnya diharapkan Renstra ini dapat menjadi panduan yang representatif bagi BP Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya dalam menghasilkan kinerja yang baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan kawasan serta dalam peningkatan ekonomi dan investasi di KPBPB Batam.

An aerial photograph of a coastal area. In the background, a large white cable-stayed bridge spans a body of water. In the foreground, there is a greenish body of water with a concrete structure, possibly a water treatment facility, featuring a walkway and a building with blue-tinted glass panels. The sky is blue with scattered white clouds.

BAB 1

PENDAHULUAN

Kondisi Umum	1
Capaian KPBPB Batam 2020-2024	2
Capaian Renstra BP Batam 2020-2024	5
Tantangan Pengembangan KPBPB Batam 2025-2029	11
Aspirasi Pemangku Kepentingan	13
Target Ekonomi Makro KPBPB Batam 2025-2029	15
Potensi dan Permasalahan	19
Analisis SWOT	26

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam) yang selanjutnya disingkat Renstra BP Batam merupakan sebuah dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam) jangka menengah tahun 2025-2029. Renstra BP Batam telah disusun mengikuti pedoman penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai langkah konkret dalam mencapai Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, maka sebagai fondasi awal untuk meneruskan kemajuan bangsa telah diterbitkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang didalamnya terdapat Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, yang memiliki sasaran meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero* emission, untuk itu Renstra BP Batam telah disusun guna mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi pemerintah sesuai dengan RPJMN 2025-2029.

Dokumen Renstra BP Batam ini merupakan penjabaran tugas dan fungsi BP Batam yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan perencanaan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dengan hasil akhir berupa pencapaian visi dan misi BP Batam tahun 2025-2029. Indikator yang digunakan bersifat indikatif yaitu bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang ingin dicapai dan bersifat tidak

kaku. Dalam penyusunannya juga merujuk pada Rencana Induk Batam Bintan Karimun (Rinduk BBK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

Pencapaian visi dan misi ini pada akhirnya diukur dengan pencapaian indikator sasaran strategis yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala BP Batam setiap tahunnya. Capaian kinerja Rencana Strategis periode sebelumnya yaitu tahun 2020-2024 dapat digunakan sebagai tolak ukur dan/atau dasar (*baseline*) dalam menetapkan target kinerja pada periode ini, disertai dengan pertimbangan perhitungan ekonomi makro dan melibatkan aspirasi masyarakat serta masukan *stakeholder* dalam rangka peningkatan pelayanan yang diukur melalui survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan setiap tahun.

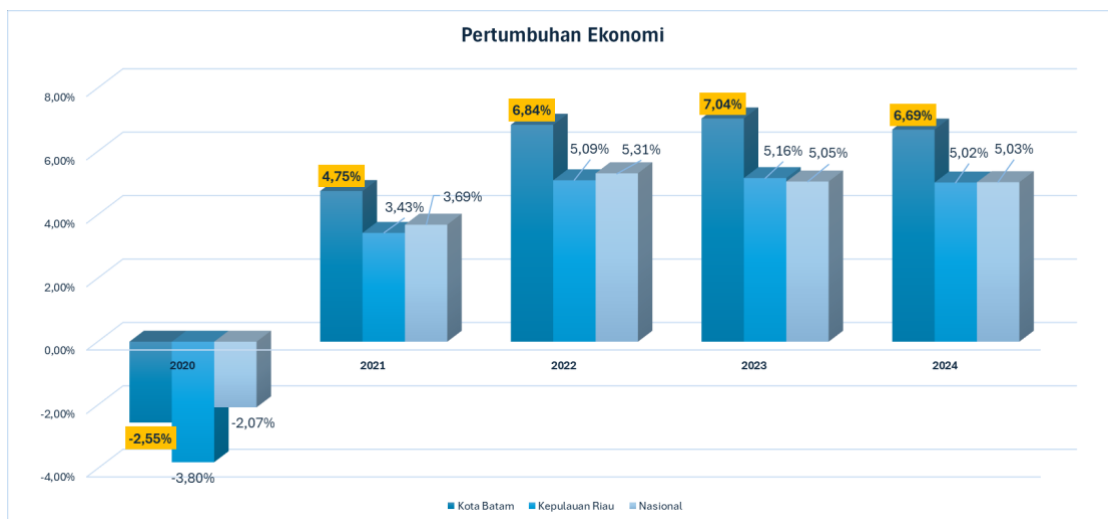
Indikator nilai realisasi investasi adalah indikator yang merepresentasikan BP Batam sebagai Pengelola KPBPB, sedangkan aspek pelayanan publik yang berkualitas merupakan aspek yang krusial bagi BP Batam sebagai lembaga pemerintah yang menerima manfaat dari layanan yang diberikan berupa peningkatan pendapatan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman bagi penetapan program dan kegiatan yang disusun BP Batam setiap tahunnya dalam rangka pembangunan KPBPB Batam yang terencana, berkesinambungan, dan berfokus untuk mencapai hasil akhir berupa KPBPB Batam yang berdaya saing serta mendukung pencapaian target RPJMN yang telah ditetapkan.

1.1.1 Capaian KPBPB Batam 2020-2024

Sepanjang rentang waktu 2020-2024, pelaksanaan pembangunan KPBPB Batam terpengaruh oleh tekanan perekonomian global. Diantaranya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan terjadinya kontraksi sosial ekonomi dan disrupti rantai pasok hingga tahun 2021, ketidakpastian geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan inflasi global dan berpengaruh pada harga pangan dunia, perubahan iklim yang berpengaruh pada terjadinya bencana alam, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mempengaruhi stabilitas perdagangan dunia, revolusi industri pada berbagai sektor yang menjadi buah dari pandemi *Covid-19* dan menjadi tantangan kesenjangan ekonomi, serta peningkatan utang global akibat dari stimulus pandemi *Covid-19*.

Dampak pandemi *Covid-19* masih berlanjut pada tahun 2020, perekonomian Batam mengalami kontraksi sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi sebesar -2,55% dan kontraksi ini lebih ringan dibandingkan rata-rata di Kepulauan Riau sebesar -3,80% dan cukup kompetitif dibandingkan angka nasional sebesar -2,07%. Kondisi ini masih terkendali mengingat saat masa pandemi *Covid-19* Batam tidak mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk keberlangsungan industri di KPBPB Batam, sehingga berhasil tumbuh sebesar 4,75% pada tahun 2021, 6,84% pada tahun 2022, 7,04% tahun 2023, dan 6,69% pada tahun 2024. Dalam lima tahun tersebut, pergerakan perekonomian Batam lebih tinggi dibandingkan perekonomian Kepulauan Riau maupun Nasional.



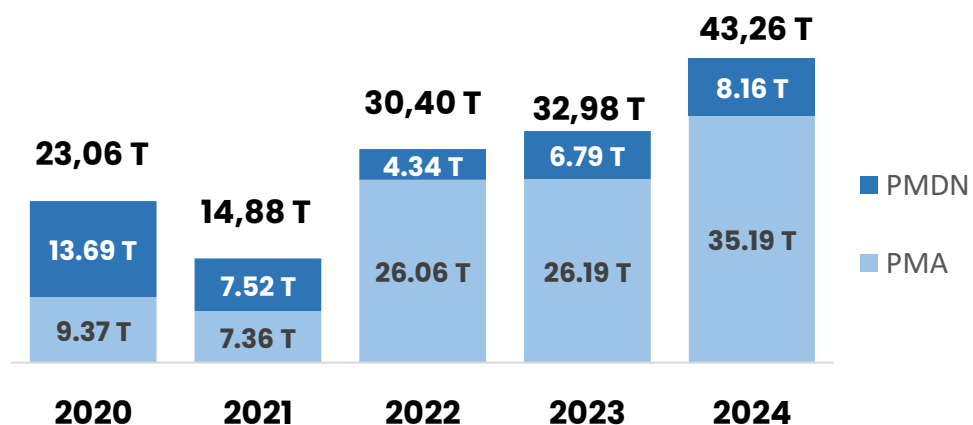
Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Batam, Kepulauan Riau, dan Nasional 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dampak yang diberikan pandemi *Covid-19* mempengaruhi pergerakan ekonomi Batam khususnya pada lapangan usaha konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Di antara empat lapangan usaha tersebut, lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang hingga kini belum sepenuhnya mengalami pemulihan secara keseluruhan dimana angka kontribusinya masih mengalami penurunan berlanjut. Disisi lain sektor pengolahan sebagai penyumbang terbesar dan penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Batam, justru mengalami peningkatan distribusi pada tahun 2020 saat pandemi *Covid-19*. Hal ini didukung oleh peningkatan nilai ekspor tahun 2020 pada jenis komoditi mesin/peralatan listrik dan benda-benda dari besi dan baja yang merupakan komponen pendukung industri pengolahan. Adapun penopang PDRB terbesar kedua yaitu pada sektor konstruksi yang sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 namun kini telah kembali tumbuh normal, hal ini tentu tidak lepas dengan pembangunan yang dilakukan BP Batam sepanjang 2020-2024 seperti pengembangan pelabuhan terminal Batu Ampar dan Kabil, pengembangan bandara Hang Nadim, penyediaan air bersih yaitu pembangunan instalasi pengelolaan air dan pipa jaringan distribusi, pembangunan jalan dan peningkatan drainase, pengembangan pelayanan dan peralatan rumah sakit BP Batam, serta pembangunan fasilitas wisata dan edukasi.

Capaian pembangunan KPBPB Batam 2020-2024 dapat dilihat dari realisasi investasi yang mencerminkan keberhasilan BP Batam dalam mencapai visi dan misinya. Tercapainya target realisasi investasi menunjukkan terciptanya iklim usaha yang kondusif, infrastruktur yang memadai, serta stabilitas politik dan ekonomi. Investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan infrastruktur sektor strategis.



Gambar 1.2. Realisasi Investasi Batam Tahun 2020-2024

Sumber: Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK (diolah)

Dalam tahun 2020, total investasi di Batam tercatat mencapai 23,06 triliun rupiah, dengan kontribusi yang cukup dominan dari PMDN sebesar 13,69 triliun rupiah, sementara PMA menyumbang 9,37 triliun rupiah yang mencerminkan

stabilitas investasi meski berada di tengah tantangan global, seperti pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi iklim ekonomi secara umum. Namun, tahun 2021 mencatat penurunan yang signifikan, dengan total investasi turun menjadi 14,88 triliun rupiah dan relatif rata antara PMDN dan PMA yaitu PMDN mencapai 7,52 triliun rupiah, sementara PMA sedikit lebih rendah di angka 7,36 triliun rupiah.

Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022, ditunjukkan dari total investasi yang meningkat drastis menjadi 30,40 triliun rupiah. Lonjakan ini didorong oleh pertumbuhan signifikan dari PMA yang naik menjadi 26,06 triliun rupiah, sedangkan kontribusi PMDN berada di angka 4,34 triliun rupiah. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan total investasi yang kembali mencatatkan peningkatan menjadi 32,98 triliun rupiah dengan PMA tetap menjadi motor penggerak utama yang berkontribusi sebesar 26,19 triliun rupiah, sementara PMDN juga mengalami peningkatan menjadi 6,79 triliun rupiah.

Dalam tahun 2024, Secara keseluruhan total investasi melonjak hingga 43,26 triliun rupiah, dengan PMA mencapai 35,19 triliun rupiah, sementara PMDN menyumbang sebesar 8,16 triliun rupiah.

Dominasi PMA menunjukkan daya tarik KPBPB Batam sebagai lokasi strategis untuk investasi global, sementara peningkatan bertahap dalam PMDN mencerminkan tumbuhnya kepercayaan pelaku usaha dalam negeri terhadap prospek ekonomi lokal.

1.1.2 Capaian Renstra BP Batam 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam, BP Batam memiliki tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi pada sektor pertanian, perdagangan, maritim, perindustrian, transportasi, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, kesehatan, sumber daya air, limbah dan lingkungan, farmasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kebudayaan, telekomunikasi, dan bidang lainnya. Renstra BP Batam 2020-2024 memuat 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan KPBPB Batam sebagai tujuan investasi di Indonesia. Tujuan ini dijabarkan menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam;
 - b. Meningkatnya prasarana dan sarana pendukung investasi di KPBPB Batam;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan; dan
 - d. Optimalisasi pemanfaatan aset BLU.
2. Mewujudkan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani. Tujuan ini dijabarkan menjadi 1 (Satu) Sasaran Strategis, yaitu:
 - a. Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani.

Selanjutnya dari sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, yang target dan capaian tiap tahunnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (beserta satuan)		Satuan	Target					Realisasi Capaian					Persentase Realisasi Capaian					Rata-Rata
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1	Nilai realisasi investasi di KPBPB Batam	Triliun rupiah	23	25	27	31	35	23,06	14,88	30,4	32,98	43,26	100,26%	59,52%	112,59%	106,39%	123,60%	100,47%
2	Meningkatnya prasarana dan sarana pendukung investasi di KPBPB Batam	2	Persentase pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi di KPBPB Batam	Persen	100	100	100	100	100	75	100	96,88	95,82	98,51	75%	100%	96,88%	95,82%	98,51%	93%
		3	Persentase penyelesaian pengembangan kawasan berwawasan lingkungan dan energi baru terbarukan	Persen	-	-	100	100	100	-	-	100	100	96,55	-	-	100%	100%	97%	98,85%
		4	Persentase penyelesaian pengembangan kawasan yang mendukung edukasi, UMKM, dan pariwisata	Persen	100	100	100	100	100	57,5	100	93	100	100	58%	100%	93%	100%	100%	90,10%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	5	Persentase ketepatan waktu penyelesaian perijinan	Persen	-	100	100	100	100	-	80,2	95,75	100	100	-	80%	96%	100%	100%	93,99%
		6	Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	85	85	86	86	86	84,1	83,86	81,69	84,03	87,02	98,94%	98,66%	96,11%	98%	101,19%	98,52%
4	Optimalisasi pemanfaatan aset BLU	7	Nilai realisasi PNBPN	Triliun Rupiah	1,3	1,67	2,09	2,26	2,47	1,31	1,42	1,96	1,94	2,29	100,77%	85,03%	93,78%	85,84%	92,71%	91,63%
		8	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	Persen	100	100	100	100	100	83	125	105,46	96,61	100	83%	125%	105%	97%	100%	102,01%
5	Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani	9	Persentase penyelesaian perencanaan pengembangan KPBPB Batam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	99,69	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	99,94%
		10	Pengembangan pelaksanaan Merit System	Indeks	-	-	-	275	275	-	-	-	278	-	-	-	-	101%	-	101%
															87,92%	93,55%	99,25%	98,35%	101,40%	96,98%

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024

Sumber: BP Batam, 2025

Indikator Sasaran Strategis **pertama** yaitu nilai realisasi investasi di KPBPB Batam. Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 KPBPB Batam memperoleh rata-rata capaian realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 100,47% dari target yang telah ditetapkan. Adanya pencapaian yang berbeda setiap tahunnya merefleksikan dinamika dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam menghadapi pandemi global serta pemulihan ekonomi.

Indikator Sasaran Strategis **kedua** adalah persentase pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang terealisasi dengan jumlah yang direncanakan dalam dokumen rencana kerja awal tahun. Rata-rata capaian realisasi indikator ini mencapai 93% dari target yang ditetapkan untuk periode 2020-2024. Capaian tersebut menggambarkan komitmen BP Batam dalam memastikan kesiapan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi elemen dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing kawasan di tingkat nasional maupun internasional.

Indikator Sasaran Strategis **ketiga** adalah Persentase Penyelesaian Pengembangan Kawasan Berwawasan Lingkungan dan Energi Baru Terbarukan. Indikator ini diukur dengan pembobotan capaian kegiatan pengembangan kawasan berwawasan lingkungan dan energi terbarukan yang terealisasi. Rata-rata capaian penyelesaian pengembangan kawasan berwawasan lingkungan dan energi baru terbarukan mencapai 98,85% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen BP Batam dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Indikator Sasaran Strategis **keempat** adalah Persentase Penyelesaian Pengembangan Kawasan yang Mendukung Edukasi, UMKM, dan Pariwisata. Indikator ini diukur dengan pembobotan capaian kegiatan pengembangan kawasan yang mendukung Edukasi, UMKM, dan Pariwisata yang terealisasi diantaranya adalah pengembangan taman kolam, taman rusa, *fisherism*,

agrowisata temiang, dan ex. camp Vietnam. Rata-rata capaian hingga tahun 2024 sebesar 90,10% dari target yang ditetapkan.

Indikator Sasaran Strategis **kelima** adalah Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan. Indikator ini diukur dengan pembobotan capaian kinerja tiap perizinan diantaranya adalah perizinan pertanahan, perizinan pemasukan barang, perizinan berusaha, dan perizinan pemasangan sambungan air bersih. Tercatat rata-rata capaian sebesar 93,99% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun angka ini menunjukkan progres yang signifikan, capaian tersebut juga menandakan adanya ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal ketepatan waktu penyelesaian. Ketepatan waktu dalam penyelesaian perizinan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap daya tarik investasi dan kepuasan para pelaku usaha.

Indikator Sasaran Strategis **keenam** adalah tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh BP Batam mencapai 98,52% dari target yang ditetapkan.

Indikator Sasaran Strategis **ketujuh** adalah Nilai Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Indikator ini mengukur tingkat capaian nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terealisasi selama periode 2020 hingga 2024. Rata-rata realisasi PNBP mencapai 91,63% dari target yang telah ditetapkan untuk periode tersebut. Hal tersebut menjadi evaluasi terhadap pelayanan BP Batam agar dapat mengoptimalkan layanannya sehingga memberikan peningkatan PNBP dalam periode berikutnya.

Indikator Sasaran Strategis **kedelapan** adalah Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). Nilai capaian Modernisasi pengelolaan BLU dihitung dari persentase penyelesaian pengembangan sistem

informasi BLU berdasarkan optimalisasi pengelolaan data pada aplikasi BIOS dan kelengkapan tahapan yang diselesaikan. Kelengkapan tahapan modernisasi BLU ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan RI setiap tahun kepada BP Batam. Modernisasi pengelolaan BLU di BP Batam berhasil mencapai melebihi dari targetnya yaitu sebesar 102,01%. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi sistem yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi.

Indikator Sasaran Strategis **kesembilan** adalah Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengembangan KPBPB Batam. Penyelesaian perencanaan pengembangan KPBPB Batam mencapai rata-rata 99,94% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen BP Batam dalam memastikan rencana pengembangan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan sektor strategis kawasan.

Indikator Sasaran Strategis **kesepuluh** adalah Pengembangan Pelaksanaan Merit Sistem. Pelaksanaan Merit Sistem menunjukkan capaian maksimal dengan rata-rata 101%. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi, transparansi, dan keadilan. Pencapaian ini juga mendukung profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan organisasi.

Selain dari capaian yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja di atas, beberapa prestasi BP Batam dalam kurun waktu 2020-2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BP Batam sebanyak 9 kali untuk setiap tahun secara berturut-turut sejak 2016 sampai tahun 2024;
2. BP Batam berhasil melaksanakan kerjasama pemanfaatan aset diantaranya pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Konsorsium PT. Bandara Internasional Batam (BIB) pada tahun 2021, Kerjasama Sistem Pengelolaan Air Bersih pada tahun 2022, Kerjasama Pengelolaan Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar dengan PT. Persero pada tahun 2023, dan Kerjasama Pengelolaan

Terminal Ferry Internasional Batam Center dengan PT. Metro Nusantara Bahari pada tahun 2024; dan

3. BP Batam menjalankan amanat dari Presiden untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah KPBPB Batam guna percepatan pengembangan kawasan dan peningkatan investasi. Terbaru pada tahun 2024, telah ditetapkan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang berlokasi di Sekupang dan Nongsa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 yang sebelumnya juga telah berdiri KEK Batam Aero Teknik (BAT) di kawasan bandara yang bergerak dibidang *Maintenance, Repair, Overhaul* (MRO) dan KEK Nongsa sebagai kawasan digital dan kreatif.

1.1.3 Tantangan Pengembangan KPBPB Batam 2025–2029

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam menghadapi tantangan lima tahun kedepan, kawasan ini dihadapkan pada berbagai tantangan sehingga membutuhkan perhitungan yang cermat dan terukur dalam pengelolaannya dan langkah yang taktis dan strategis dalam pelaksanaannya agar berdaya saing tinggi. Tantangan ini dikategorikan ke dalam dua aspek utama yaitu Kewilayahan KPBPB dan Kelembagaan BP Batam.

1.1.3.1 Tantangan Kewilayahan KPBPB

a. Persaingan Kawasan Industri Internasional

Adanya persaingan kawasan industri internasional terutama dengan munculnya kawasan Free Trade Zone (FTZ) sejenis di negara-negara seperti China, Vietnam, dan Malaysia, serta yang terbaru adalah Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) yang diluncurkan tahun 2025. Jika kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) tidak dikelola secara inovatif dan kompetitif, maka potensi kehilangan daya tarik investasi akan semakin besar.

b. Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 membawa tantangan signifikan dengan prediksi bahwa sekitar 60% pekerjaan manusia akan tergantikan oleh otomatisasi dan teknologi kecerdasan buatan/ akal imitasi (AI). Hal ini memerlukan upaya

pengembangan tenaga kerja yang berorientasi pada teknologi, peningkatan kompetensi digital, dan menciptakan SDM yang adaptif terhadap perubahan teknologi.

c. Ketersediaan lahan untuk Investasi

Ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama, terutama karena sebagian besar kawasan pesisir dan perairan yang akan direklamasi belum dapat diberikan untuk tujuan pengembangan kawasan sehingga berdampak pada investasi di KPBPB Batam. Saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk itu diperlukan peraturan turunan pelaksanaan utamanya dalam pengelolaan kawasan pesisir dan reklamasi.

d. Permasalahan Pemukiman Ilegal (Rumah Liar)

Permasalahan rumah liar di KPBPB Batam memerlukan pendekatan yang humanis dan solutif agar terciptanya kondisi masyarakat yang tetap kondusif untuk menjaga iklim investasi. Program penyediaan rumah susun menjadi salah satu langkah konkrit yang ditawarkan dan sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

e. Pengembangan kawasan terintegrasi Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

Sebagai kawasan yang berada di jalur strategis Selat Malaka, BBK memiliki potensi besar untuk menjadi pusat logistik dan perdagangan internasional. Selain itu, kawasan ini juga berperan sebagai pintu utama masuknya investasi, barang, dan jasa. Optimalisasi pengembangan kawasan ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat distribusi dan perdagangan.

f. Ketersediaan Air dan Energi

Kebutuhan air bersih di kawasan Batam-Rempang-Galang (Barelang) diperkirakan akan mengalami defisit pada tahun 2030 jika tidak ada upaya mitigasi. Untuk itu, diperlukan pengembangan sumber air baku alternatif, seperti instalasi desalinasi air laut (SWRO) dan pembangunan waduk baru. Begitu pula kebutuhan energi, yang harus dipenuhi secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas investasi dan penduduk di kawasan ini.

1.1.3.2 Tantangan Kelembagaan BP Batam

a. Hubungan Kerja dengan Pemerintah Daerah

Perlu adanya harmonisasi hubungan kerja antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan kawasan.

b. Harmonisasi Regulasi

Harmonisasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dengan regulasi kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Penyelarasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pengelolaan kawasan.

c. Kapasitas kelembagaan BP Batam

BP Batam menghadapi tantangan dalam mempertegas statusnya sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) atau Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui jenjang karier yang jelas dan sistem kepegawaian yang terstruktur juga diperlukan untuk mendukung kinerja kelembagaan.

1.1.4 Aspirasi Pemangku Kepentingan

a. Kementerian PPN/Bappenas

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029, wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Untuk mendukung tujuan ini, BP Batam diharapkan dapat

mengimplementasikan pengembangan dalam dua konteks yaitu Koridor Industri: *Batam Smart Industrial and Logistic Hub* dan konteks kawasan perkotaan: *Batam Dynamic Sister City of Singapore*.

b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kemenko Perekonomian menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur Batam-Bintan-Karimun (BBK) yang terintegrasi dan saling mendukung. Infrastruktur ini harus dapat mengoptimalkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus investasi, dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah harmonisasi regulasi perizinan untuk memudahkan proses investasi. Selain itu, promosi BBK di pasar internasional juga perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investor global.

c. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau

Kadin Kepri menilai bahwa sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada di Batam perlu dilakukan perbaikan, terutama untuk beberapa izin terkait lingkungan, seperti Amdal, andalalin, dan KKPR yang saat ini masih harus melalui proses panjang di Kantor Pusat Kementerian terkait di Jakarta. Hal ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan kemudahan dalam perizinan, guna mempercepat proses investasi dan mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan perizinan.

d. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam

Kadin Batam menekankan pentingnya potensi Batam dalam industri logistik. Diharapkan proses perizinan di Batam dapat lebih memudahkan perusahaan lokal untuk bersaing di pasar global. Renstra BP Batam juga diharapkan dapat menjadi sarana *transfer knowledge* yang bermanfaat, baik bagi pengusaha lokal maupun calon investor, guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

e. Batam Shipyard and Offshore Assosiation (BSOA)

BSOA mengajukan kebutuhan untuk memperbaiki dan memperluas alur utama yang mendukung kegiatan *Repair & Maintenance* kapal besar, terutama di kawasan Tanjung Uncang dan Batu Ampar. Selain itu, pengelolaan limbah B3 juga perlu ditingkatkan, karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut masih belum dikelola secara optimal. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan limbah

yang baik akan mendukung keberlanjutan industri maritim Batam serta memenuhi standar lingkungan.

f. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)

Apindo menyoroti pentingnya Batam untuk mendukung perusahaan yang mengimplementasikan *green energy* dan *renewable energy* dalam operasional mereka. Perusahaan yang sudah memanfaatkan energi ramah lingkungan diharapkan dapat memperoleh sertifikat *renewable energy* sebagai bentuk pengakuan. Dalam hal ini, BP Batam diharapkan berperan dalam membantu memperoleh sertifikat tersebut, serta mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi praktik keberlanjutan dalam operasional mereka.

g. Nongsa Digital Park

Nongsa Digital Park (NDP) mengemukakan bahwa untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan kawasan ini, ketersediaan listrik dan air yang cukup sangat penting. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan infrastruktur yang handal akan mendukung Batam sebagai destinasi utama bagi perusahaan teknologi dan digital yang berorientasi internasional.

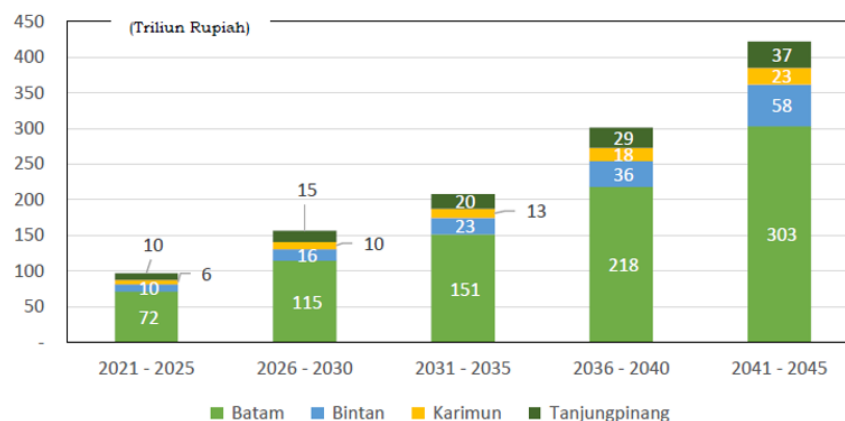
1.1.5 Target Ekonomi Makro KPBPB Batam 2025-2029

Skenario arah pengembangan Kawasan BBK meliputi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi ke dalam 3 (tiga) skenario utama. Pertama, Skenario Pesimis dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara historis pada Kawasan BBK. Kedua, Skenario Moderat dihitung berdasarkan target pertumbuhan ekonomi dalam Perencanaan masing-masing kabupaten kota di Kawasan BBK. Ketiga, Skenario Optimis dihitung berdasarkan target pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga skenario tersebut membedakan derajat ekspansi ekonomi Kawasan BBK di mana Skenario Pesimis memiliki asumsi pengembangan paling konservatif, sementara Skenario Optimis memiliki asumsi pengembangan ekonomi paling progresif.

Berdasarkan pertimbangan tren pertumbuhan ekonomi saat ini, atas kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada KPBPB, maka dipilih Skenario Optimis sebagai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kawasan BBK Tahun 2021-2045. Pemilihan Skenario Optimis tersebut didasarkan pada

pertimbangan adanya kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 terkait Rencana Induk Pengembangan BBK yang menata ulang pengelolaan KPBPB BBK mulai dari perencanaan dan pengembangan kawasan yang terintegrasi, penataan kelembagaan, pengaturan kebijakan perizinan dan investasi, hingga pengaturan terkait fasilitas dan kemudahan di KPBPB BBK. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan BBK, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pemilihan Skenario Optimis sebagai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kawasan BBK Tahun 2021-2045 menjadi acuan dasar dalam penentuan proyeksi data perekonomian lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut rincian proyeksi kebutuhan investasi di Kawasan BBK untuk Skenario Optimis ditargetkan rata-rata sebesar Rp98 triliun per tahun pada tahun 2025-2029 dan mencapai rata-rata sebesar Rp471 triliun per tahun pada tahun 2041-2045. Kebutuhan investasi tersebut kemudian dirinci berdasarkan kawasan, di mana pada tahun 2026-2030, target rata-rata kebutuhan investasi terbesar terdapat di Batam yaitu sebesar Rp115 triliun diikuti secara berurutan oleh Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Adapun pada tahun 2041-2045, target rata-rata kebutuhan investasi tahunan di Batam sebesar Rp303 triliun, Bintan sebesar Rp58 triliun, Karimun sebesar Rp23 triliun, dan Tanjungpinang sebesar Rp37 triliun.



**Gambar 1.3. Target Investasi di Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
2021-2045**

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024

Target rata-rata kebutuhan investasi tahunan Kawasan BBK tahun 2026-2030 sebesar Rp156 triliun pada prinsipnya tidak hanya berasal dari kebutuhan investasi baru, melainkan juga berasal dari pengembangan investasi yang telah ada.



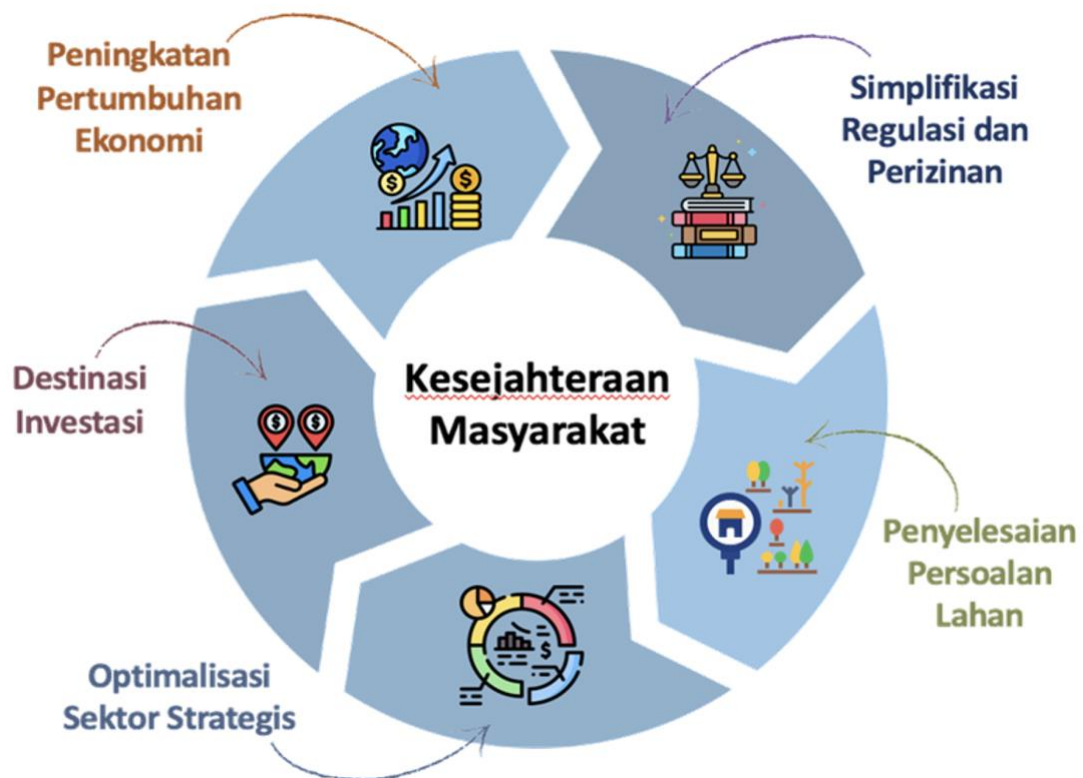
Gambar 1.4. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Jajaran Pimpinan Badan Pengusahaan Batam di Istana Merdeka

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025.

Mengacu pada arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 13 Maret 2025 dan 22 Mei 2025 di Istana Negara Jakarta agar pengembangan Batam mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga kesejahteraan Masyarakat dapat digesa untuk meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal tersebut sejalan dengan upaya Batam dalam meningkatkan realisasi investasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10 persen pada tahun 2029. Adapun arahan Bapak Presiden kepada BP Batam adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat simplifikasi perizinan yang transparan dan akuntabel;
2. Melakukan penyelarasan terhadap berbagai regulasi yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan investasi;
3. Selesaikan persoalan kepemilikan lahan non produktif;
4. Mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang dengan tetap menjaga iklim investasi;
5. Optimalisasi sektor strategis seperti Kawasan Industri, galangan kapal, logistik untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional;
6. Jadikan Batam menarik sebagai destinasi investasi;
7. Kembangkan Batam menjadi kota yang indah, nyaman & menarik bagi penduduk serta pekerja; dan

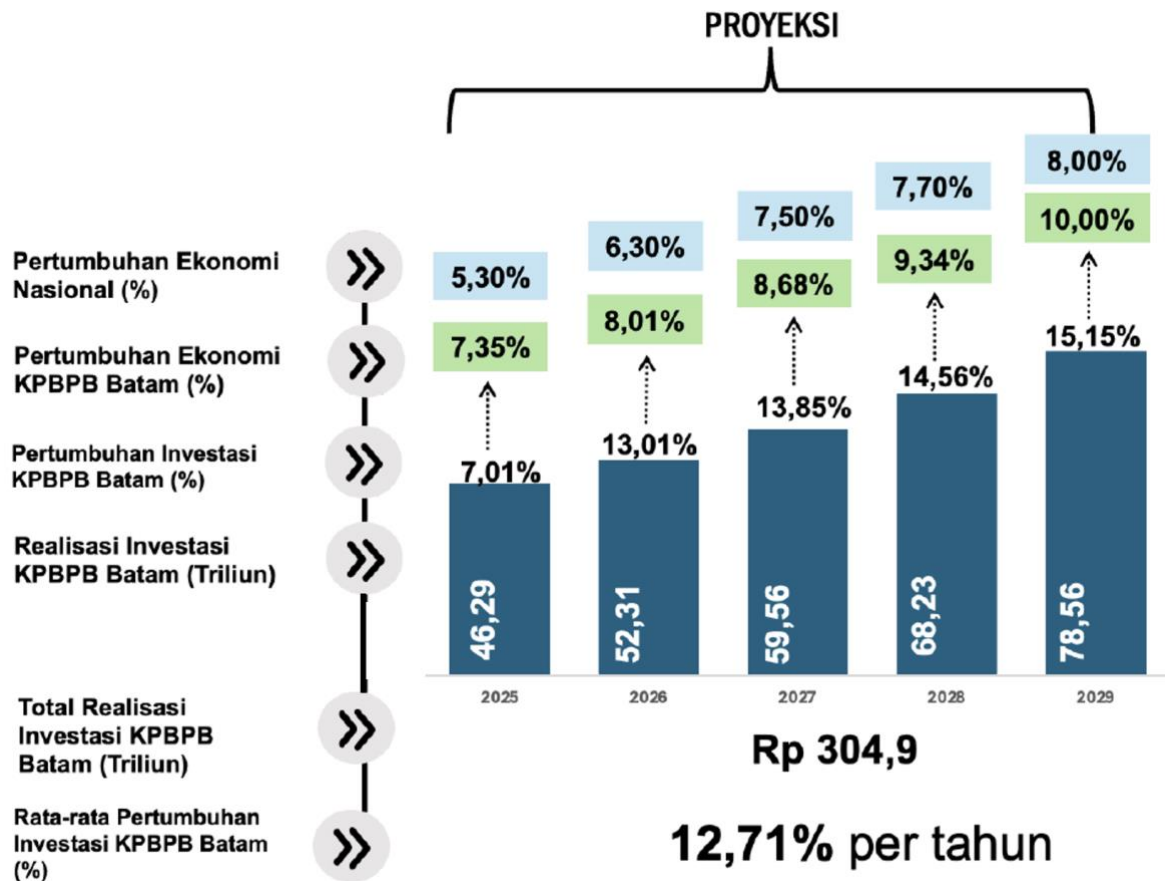
8. Pengelolaan investasi Batam bisa memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan Masyarakat.



Gambar 1.5. Arahan Bapak Presiden kepada BP Batam

Sumber: Pusrenpros, 2025

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan dukungan investasi yang signifikan selama periode lima tahun ke depan. Total investasi yang dibutuhkan di Batam pada tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mencapai Rp304,9 triliun. Investasi ini akan tumbuh secara bertahap, dimulai dari 46,29 triliun rupiah pada tahun 2025, meningkat menjadi 52,31 triliun rupiah pada tahun 2026, 59,56 triliun rupiah pada tahun 2027, 68,23 triliun rupiah pada tahun 2028, dan 78,56 triliun rupiah pada tahun 2029. Dengan asumsi pertumbuhan investasi rata-rata sebesar 12,71 persen per tahun, diharapkan peningkatan investasi ini akan mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Batam, sehingga target pertumbuhan sebesar 10 persen pada tahun 2029 dapat tercapai.



Gambar 1.6. Target Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi KPBPB Batam

Sumber: Deputi/Bidang Investasi dan Pengusahaan, 2025

Target ini menunjukkan komitmen kuat KPBPB Batam dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, serta memastikan bahwa Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

a. Potensi Kawasan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam BP Batam memiliki beberapa potensi yang dapat memperkuat pelaksanaan fungsinya sebagai pengelola kawasan, antara lain:

1. *Batam is like heaven grafted by God on earth*, lokasi geografis yang dianugerahi dengan aksesibilitas yang sangat mudah ke negara lainnya di belahan dunia

menjadi pintu masuknya investasi dan perdagangan dari luar negeri, karena berada di jalur perdagangan selat malaka yang merupakan jalur tersibuk kedua di dunia. Terdapat hampir 100.000 kapal yang melintasi selat malaka setiap tahunnya membawa $\frac{1}{4}$ dari barang yang diperdagangkan di dunia atau dengan kapasitas mencapai 70 juta TEUs. Berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, menciptakan peluang bagi investor dan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di berbagai sektor, seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan. Dengan demikian, Batam memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, yang didorong oleh dinamika Selat Malaka sebagai jalur pelayaran dan logistik dunia.

2. Insentif KPBPB dan KEK. KPBPB dirancang untuk menarik investasi dan perdagangan internasional melalui serangkaian insentif fiskal. Kebijakan ini meliputi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk transaksi barang di dalam kawasan. Selain itu, KPBPB memberlakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 70 negara mitra. Implementasi P3B bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama, baik di Indonesia maupun di negara domisili investor. Insentif ini berkontribusi pada penurunan biaya produksi dan peningkatan daya saing produk di pasar global. Sementara itu, dalam skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Batam memberikan insentif tambahan yang lebih agresif untuk menarik investasi besar pada sektor strategis. Di antaranya adalah fasilitas *tax holiday*, yaitu pembebasan Pajak Penghasilan Badan hingga 20 tahun untuk investasi minimal 1 triliun rupiah, serta pembebasan bea masuk dan pajak ekspor-impor untuk barang modal dan bahan baku.
3. Infrastruktur yang handal. KPBPB dirancang dengan penekanan pada penyediaan infrastruktur berkualitas tinggi untuk mendukung kegiatan investasi. Jaringan jalan yang luas dan terpelihara dengan baik menghubungkan Bandara Internasional Hang Nadim dengan Pelabuhan Terminal Batu Ampar, dan berbagai kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi logistik dan memfasilitasi pergerakan barang dan tenaga kerja. Selain itu, KPBPB Batam menjamin pasokan utilitas esensial, termasuk air bersih dan

listrik dengan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional industri. Ketersediaan infrastruktur yang handal ini merupakan faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan tersebut.

4. Pengembangan Rempang-Galang. Pemerintah telah menetapkan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di KPBPB Batam yaitu i) PSN Rempang Eco City (REC) dan ii) PSN Kawasan Industri Wiraraja-GESEIP. Pulau-pulau ini menawarkan lahan yang luas dan belum termanfaatkan, menyediakan ruang bagi pertumbuhan industri dan investasi di masa depan. Pengembangan Rempang-Galang diproyeksikan akan menampung berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, logistik, hingga pariwisata. Ekspansi ini akan meningkatkan kapasitas industri KPBPB Batam secara signifikan, menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.
5. Kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada BP Batam dalam mengelola KPBPB yang sebagian besar kewenangan pengurusan perizinan dari kementerian dan lembaga pusat diserahkan kepada BP Batam untuk perizinan 16 sektor strategis sehingga menciptakan sistem perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi melalui OSS berbasis risiko. Adapun tujuan utamanya untuk penyederhanaan birokrasi, percepatan investasi, dan kepastian serta transparansi. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha dan menarik lebih banyak investasi masuk ke KPBPB Batam.
6. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan aset BP Batam. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, BP Batam aktif menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan aset strategis seperti bandara, pelabuhan, dan air minum. Kerjasama ini mencakup pengembangan terminal baru di bandara, modernisasi fasilitas pelabuhan dan pengembangan kawasan terminal *ferry* internasional, dan pengoptimalan sistem distribusi air minum. Kolaborasi ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar arus logistik, mengurangi biaya operasional, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kerjasama ini, BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di KPBPB Batam.

7. Kawasan Industri Terpadu. Dengan 31 kawasan industri yang tersebar di Batam, pengelolaan kawasan menjadi lebih rapi dan tertata. Saat ini terdapat 2 kawasan industri terbesar di Batam yaitu i) Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE) dengan luas area 540 Ha yang fokus melayani industri minyak dan gas, energi, pergerakan kargo berat dan ukuran besar, dan ii) Batamindo Industrial Estate (BIE) dengan luas area 320 Ha yang fokus melayani industri manufaktur elektronika, semikonduktor, peralatan listrik, alat komunikasi, dan alat kesehatan. Pengelolaan yang terpadu ini menciptakan lingkungan industri yang efisien, aman, dan berkelanjutan, dengan infrastruktur yang terintegrasi, utilitas yang handal, dan kemudahan akses bagi investor. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan mendorong pertumbuhan investasi. Keberadaan kawasan industri terpadu ini merupakan salah satu daya tarik utama KPBPB Batam bagi investor baik domestik maupun asing.
8. Relokasi perusahaan akibat tarif AS terhadap China. Peningkatan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap barang-barang dari China telah menciptakan peluang bagi Batam untuk menjadi tujuan relokasi perusahaan. Selain insentif fiskal yang menarik, Batam juga menawarkan infrastruktur yang handal, biaya produksi yang kompetitif, dan tenaga kerja yang terampil, sehingga menjadi destinasi yang menguntungkan bagi perusahaan China yang ingin memperluas pasar global dan meningkatkan daya saing. Beberapa perusahaan China di sektor elektronik dan manufaktur telah menunjukkan minat untuk merelokasi pabrik mereka ke Batam. Relokasi ini diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan ekonomi di KPBPB.

9. Munculnya sektor ekonomi baru seperti Industri Hijau dan ICT. KPBPB Batam memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh kemunculan sektor-sektor ekonomi baru, seperti industri hijau dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Beberapa perusahaan telah melakukan investasi strategis dalam pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor-sektor ini melalui berbagai insentif dan kebijakan yang mendukung. Transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis inovasi diharapkan dapat memperkuat posisi KPBPB Batam dalam persaingan ekonomi global.

b. Kelembagaan BP Batam

Beberapa potensi dalam Kelembagaan BP Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU.** Sebagai BLU, BP Batam memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada BP Batam termasuk dalam hal penggunaan pendapatan dan penetapan tarif layanan. Hal ini memungkinkan BP Batam untuk merespon kebutuhan pelayanan dengan cepat, menawarkan tarif layanan yang kompetitif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. BP Batam juga dapat secara fleksibel mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur pendukung investasi, promosi dalam rangka menarik investor, dan melaksanakan program-program lainnya berdasarkan fungsi KPBPB.
2. **Bagian dari Rencana Pengembangan sesuai Rencana Induk (Rinduk) BBK.** Sebagai entitas yang terintegrasi dalam kerangka Rinduk BBK, BP Batam memiliki panduan strategis yang komprehensif dalam mengelola dan mengembangkan KPBPB. Rinduk BBK mengidentifikasi enam sektor ekonomi utama sebagai fokus pengembangan: Hub Logistik Internasional, Kedirgantaraan, Industri Ringan dan Bernilai Tinggi, Industri Digital dan Kreatif, Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional, serta Pariwisata Kesehatan Terintegrasi. BP Batam secara aktif memfasilitasi pertumbuhan sektor-sektor ini melalui penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal, pengembangan infrastruktur

pendukung, dan optimalisasi proses perizinan. Strategi ini diproyeksikan akan meningkatkan daya saing KPBPB, menarik investasi asing, dan menghasilkan dampak *multiplier* yang signifikan bagi perekonomian regional.

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi BP Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

a. Permasalahan dalam Pengembangan Kawasan Strategis

1. Ketersediaan lahan untuk investasi di Batam semakin terbatas, terutama di kawasan hutan, perairan, dan area dengan keberadaan bangunan liar/ tanpa izin. Kawasan hutan lindung memiliki regulasi ketat yang membatasi pengembangan industri, sementara kawasan perairan memerlukan reklamasi yang membutuhkan biaya besar dan studi dampak lingkungan yang komprehensif. Keberadaan rumah liar juga menimbulkan permasalahan sosial dan legalitas lahan, yang menghambat pengembangan investasi. Hal ini dapat mengurangi daya tarik Batam bagi investor yang membutuhkan lahan luas, mengurangi potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi baru, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
2. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dengan kementerian sektoral, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut). Hal ini terlihat dalam proses perizinan pemanfaatan ruang laut dan kawasan hutan untuk kegiatan investasi, di mana terdapat perbedaan interpretasi dan prosedur antara BP Batam dan kementerian terkait. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, menghambat proses perizinan, dan berpotensi mengurangi minat investasi di KPBPB.
3. Ketersediaan sumber air baku menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pembangunan di Batam. Proyeksi kebutuhan air untuk Data Center Nongsa, Industri Solar Panel, dan Industri di Bandara menunjukkan bahwa Batam

akan menghadapi defisit air pada tahun 2030. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air baku di Batam, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, industri, dan proyek-proyek strategis tersebut, diperkirakan akan terjadi defisit air. Defisit air ini dapat mengganggu aktivitas industri, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

4. KPBPB Batam menghadapi persaingan ketat dari kawasan industri di luar negeri, seperti China, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia, yang menawarkan upah buruh yang lebih murah. Kawasan industri di negara-negara tersebut menawarkan berbagai insentif, seperti tax holiday, kemudahan perizinan, dan biaya produksi yang lebih rendah. Persaingan ini dapat mengurangi daya tarik Batam bagi investor asing, menghambat pertumbuhan investasi, mengurangi laju ekspansi industri, dan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja.
5. Posisi Singapura sebagai investor asing terbesar di Batam (61% pada tahun 2024) menciptakan ketergantungan yang signifikan. Perubahan dinamika ekonomi Singapura, seperti resesi atau perubahan fokus investasi, dapat berdampak signifikan terhadap Batam. Penurunan investasi Singapura dapat memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa di Batam, mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada Singapura dan meningkatkan ketahanan ekonomi Batam.

b. Permasalahan dalam Pengelolaan Dukungan Manajemen BP Batam

1. Keterbatasan kapasitas fiskal BP Batam menjadi kendala signifikan dalam upaya pengembangan infrastruktur di KPBPB. Dengan anggaran sumber pendanaan PNBP untuk belanja modal infrastruktur di bawah 1 triliun rupiah per tahun, BP Batam menghadapi tantangan dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur baru yang esensial, seperti perluasan jaringan jalan, peningkatan kapasitas pelabuhan, dan

modernisasi sistem utilitas. Akibatnya, daya saing KPBPB dapat tergerus dibandingkan kawasan industri lain yang memiliki infrastruktur lebih modern dan efisien.

2. Ketidakjelasan bentuk kelembagaan BP Batam, apakah sebagai Kementerian/Lembaga atau Badan Layanan Umum, menimbulkan berbagai permasalahan internal yang mempengaruhi efektivitas kinerja dan profesionalisme SDM. Status kepegawaian pegawai tetap di BP Batam belum jelas, menciptakan ketidakpastian dan berpotensi menghambat pengembangan karir. Tidak adanya penambahan pegawai tetap selama kurang lebih 8 tahun, dengan hanya mengandalkan tenaga pendukung yaitu Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P2K) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), menimbulkan kekurangan SDM yang berpengalaman dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ketidakjelasan jenjang karir juga mengurangi motivasi dan loyalitas pegawai. Pemerintah perlu segera menetapkan bentuk kelembagaan BP Batam yang definitif agar status kepegawaian menjadi jelas, proses rekrutmen dan pengembangan SDM dapat dioptimalkan, serta tercipta sistem karir yang transparan dan adil. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme SDM, efisiensi birokrasi, dan pada akhirnya mendukung pengembangan KPBPB yang lebih optimal.

1.2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh BP Batam. Dalam konteks ini, analisis tersebut akan memberikan gambaran tentang kekuatan yang dimiliki BP Batam dan akan menyoroti kelemahan yang mungkin menghambat pertumbuhan jangka panjang. Melalui analisis ini, kami juga akan mengidentifikasi peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini, BP Batam dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan.

I N T E R N A S I O N A L	STRENGTHS	WEAKNESSES
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi geografis yang strategis ▪ Insentif KPBPB ▪ Infrastruktur yang handal ▪ Pengembangan Rempang-Galang ▪ Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU ▪ Kewenangan sesuai PP 41/2021 ▪ Kerjasama dengan pihak Swasta dalam pengelolaan aset di BP Batam (Bandara, Pelabuhan, dan Air Minum) Memiliki kawasan industri terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan lahan yang terbatas untuk pengembangan dimasa depan ▪ Sumber air baku yang terbatas ▪ Keterbatasan kapasitas fiskal pembangunan infrastruktur BP Batam
E K S T E R N A L	+ OPPORTUNITIES	THREATS -
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi Selat Malaka sebagai alur pelayaran dan logistik dunia. ▪ Relokasi perusahaan akibat tarif AS terhadap China ▪ Bagian dari Rencana Pengembangan sesuai Rinduk BBK ▪ Munculnya sektor ekonomi baru seperti Industri Hijau dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetisi dari Kawasan industri lainnya ▪ Perubahan dinamika ekonomi Singapura ▪ Hambatan perdagangan yang menahan perkembangan ekonomi

Tabel 1.2 Analisis SWOT

Sumber: Pusrenpros, 2025

KPBPB Batam memiliki sejumlah kekuatan strategis (*strengths*) yang menjadikannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Lokasinya yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional, ditambah dengan infrastruktur yang handal dan dukungan kebijakan insentif dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), memberikan nilai tambah yang besar bagi investor. Selain itu, pengembangan kawasan Rempang-Galang serta fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum (BLU) dan kewenangan penuh yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 semakin memperkuat otonomi dan daya tarik Batam. Kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan aset vital seperti bandara, pelabuhan, dan air minum juga menjadi penopang utama dalam pembangunan kawasan industri yang terintegrasi.

Namun demikian, Batam masih menghadapi sejumlah kelemahan (*weaknesses*) internal yang perlu segera diatasi. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pengembangan masa depan menjadi tantangan utama, terlebih jika permintaan investasi terus meningkat. Selain itu, sumber air baku yang terbatas

serta ketergantungan pada kapasitas fiskal Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan kawasan.

Dari sisi eksternal, Batam memiliki berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat dimaksimalkan. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia menjadikan kawasan ini sangat ideal sebagai hub logistik dan pelayaran internasional. Situasi geopolitik seperti relokasi industri akibat tarif AS terhadap China membuka peluang baru bagi Batam sebagai alternatif tujuan investasi. Kawasan ini juga termasuk dalam Rencana Pengembangan strategis wilayah BBK, dan menunjukkan potensi besar dalam sektor-sektor baru seperti industri hijau, teknologi informasi, dan komunikasi.

Di sisi lain, Batam tidak luput dari ancaman (*threats*) eksternal yang dapat menghambat kemajuan. Persaingan dengan kawasan industri lain di dalam dan luar negeri semakin ketat, termasuk dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Perubahan dinamika ekonomi regional, khususnya di Singapura, serta hambatan perdagangan global juga dapat mempengaruhi kelangsungan investasi dan ekspor-impor dari kawasan ini.

Melalui pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal secara optimal, serta mitigasi terhadap kelemahan dan ancaman yang ada, Batam memiliki prospek yang kuat untuk terus berkembang sebagai kawasan industri, logistik, dan teknologi berkelas dunia.



BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi	31
Misi	31
Tujuan	32
Sasaran Strategis	32
Indikator Sasaran Strategis dan Indikasi Risiko	32
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	36

2.1 Visi

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dan berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan, serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2025-2029 atau dalam 5 tahun ke depan ditetapkan Visi BP Batam yaitu:

“Kawasan ekonomi yang maju dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Adapun visi di atas memiliki arti:

1. BP Batam berperan aktif dalam menarik investasi luar dan dalam negeri pada sektor prioritas untuk mendukung keunggulan dan daya saing dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional;
2. Maju berarti berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing tinggi di kancah domestik dan global;
3. Berkelanjutan berarti lestari dan seimbang antara pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan;
4. BP Batam mendorong peningkatan kinerja kelembagaan agar menjadi institusi yang kredibel dalam pengelolaan KPBPB guna mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

2.2 Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka BP Batam menyelaraskan misinya sebagai berikut:

MISI 1	Menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan investasi bernilai tinggi
MISI 2	Meningkatkan kinerja kelembagaan BP Batam yang efektif dan efisien

2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BP Batam menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

TUJUAN 1	KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
TUJUAN 2	Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun untuk Tujuan 1, akan diukur melalui indikator Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam, sedangkan Tujuan 2 diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

2.4 Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan BP Batam di tahun 2025-2029, maka ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

SASARAN STRATEGIS 1	Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam
SASARAN STRATEGIS 2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam
SASARAN STRATEGIS 3	Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

2.5 Indikator Sasaran Strategis dan Indikasi Risiko

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dari BP Batam di tahun 2025-2029, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja BP Batam untuk lima tahun ke depan. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2025, yang mengamanatkan pengikutsertaan Manajemen Risiko dalam penyusunan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka pada Sasaran Strategis BP Batam disertakan juga indikasi risiko, perlakuan risiko, dan penanggung jawab perlakuan risiko, yaitu:

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam		
IKSS-1 Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Batam <p>Nilai realisasi investasi merupakan jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke KPBPB Batam berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan alat ukur utama dalam menilai keberhasilan BP Batam dalam mengelola kawasan KPBPB. Pengukuran indikator ini bertujuan memacu BP Batam dalam mengembangkan KPBPB Batam menjadi kawasan tujuan investasi di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa segala kegiatan pengembangan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan memberikan hasil dan manfaat sehingga menarik para pelaku usaha untuk menanamkan dan/atau menambahkan modalnya di KPBPB Batam</p> <p>Diukur dengan melihat:</p> <p>Besaran nilai realisasi investasi yang berasal dari luar negeri (PMA) dan dari dalam negeri (PMDN) setiap tahun selama lima tahun.</p>		
Manajemen Risiko Sasaran Strategis 1		
Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
1. Volatilitas ekonomi global	a. Perkuatan promosi langsung dan terarah	1.Dit. Investasi
	b. Perkuatan kesepakatan dengan negara atau pengelola kawasan ekonomi regional	1.Dit. Pengembangan KPBPB & KEK 2.Dit. Pengendalian usaha
2. Kebutuhan industri dengan skill tenaga kerja tidak sesuai	Perkuatan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV)	1.Dit. Investasi 2.Dit. Pengembangan KPBPB & KEK 3.Dit. Pengendalian Pengusahaan
3. Ketersediaan lahan yang terbatas	Perluasan area untuk pengembangan kawasan investasi baru	1.Dit. Pengelolaan Lahan 2.Dit. Pengelolaan Lahan, Pesisir & Reklamasi 3.Dit. Pengendalian Lahan, Pesisir & Reklamasi
4. Kurangnya infrastruktur pendukung	Pembangunan infrastruktur pendukung investasi yang modern dan berkelanjutan	1.Dit. Pembangunan Infrastruktur 2.Dit. Perencanaan Infrastruktur 3.Dit. Pengamanan Aset dan Kawasan

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam

IKSS-2 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Umum dan Kawasan

Dalam memberikan pelayanan publik kepada pengguna layanan, BP Batam diharapkan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna layanan. Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pelanggan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Diukur dengan melihat:

Indeks kepuasan masyarakat yang didapatkan dari hasil survei kepada pelanggan pengguna jasa pelayanan yang diukur dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

- Persyaratan pelayanan;
- Prosedur pelayanan;
- Waktu pelayanan;
- Biaya/tarif;
- Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- Kompetensi pelaksana;
- Perilaku pelaksana;
- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan
- Sarana dan prasarana.

IKSS-3 Nilai Realisasi PNBP BP Batam

Nilai realisasi PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh dari badan dan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh BP Batam, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain. Indikator ini bertujuan untuk memacu BP

Batam agar dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber pendapatan. Penggunaan PNPB ini untuk membiayai seluruh operasional BP Batam, dan juga membiayai pembangunan dan peningkatan fasilitas prasarana dan sarana di KPBPB Batam.

Diukur dengan melihat:

Jumlah pendapatan dari seluruh layanan di BP Batam meliputi Uang Wajib Tahunan dari Lahan, serta pendapatan Badan Usaha di BP Batam yang diperoleh setiap tahun selama lima tahun.

Manajemen Risiko Sasaran Strategis 2

Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
1. Keterbatasan kapasitas kawasan (bandara, pelabuhan)	Optimalisasi pengembangan melalui pendanaan Non PNPB-BLU	1. Dit. Kepelabuhanan 2. Dit. Pengelolaan Kawasan Bandara 3. Dit. Lalu Lintas Barang
2. Fasilitas layanan umum belum dimodernisasi	Peningkatan dan modernisasi layanan umum	1. Badan Usaha Spam Fasling 2. Badan Usaha Rumah Sakit

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel

IKSS-4 Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan dari Reformasi Birokrasi menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mengukur tercapainya tujuan RB menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Diukur dengan melihat:

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) diukur melalui indikator-indikator yang mewakili program-program dan sasaran reformasi birokrasi. Indikator-indikator tersebut meliputi:

- Meningkatnya kapasitas APIP,
- Meningkatnya integritas aparatur,

<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi penyelenggaraan, • Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan • Peningkatan kualitas pelayanan publik 		
Manajemen Risiko Sasaran Strategis 3		
Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
1. Kualitas sumber daya manusia	Implementasi sistem merit dalam pengelolaan organisasi yang akuntabel	1. Biro SDM 2. Biro Keuangan 3. Satuan Pemeriksaan Internal 4. Biro Umum.
2. Struktur organisasi tidak efisien	Evaluasi struktur dan proses bisnis yang lebih efisien	1. Dit. OKMR 2. Biro Hukum
3. Implementasi arsitektur pemerintahan digital belum optimal	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. PDSI 2. Pusat Perencanaan Program Strategis 3. Pusat Harmonisasi Kebijakan 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program


Dalam rangka mencapai 3 (tiga) sasaran strategis di atas, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 7 (tujuh) Sasaran Program di lingkungan Badan Pengusahaan Batam sebagaimana berikut:

No	Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Koordinator Program
1	Program Pengembangan Kawasan Strategis	SP 1	IKP 1	Jumlah Minat Investasi
			IKP 2	
		SP 2	IKP 3	Luas lahan, pesisir, dan reklamasi yang dialokasikan untuk investasi
			IKP 4	

		SP 3	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur	IKP 5	Persentase pembangunan infrastruktur pendukung investasi	Anggota Bidang Infrastruktur
				IKP 6	Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, aset, dan objek vital	
		SP 4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam	IKP 7	Rata-rata IKM pengguna layanan BU	Anggota Bidang Pelayanan Umum
				IKP 8	Realisasi PNBP BU	
		SP 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang	IKP 9	Rata-rata IKM pengguna layanan Bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang	Anggota Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang
				IKP 10	Realisasi PNBP Kawasan Bandara dan Pelabuhan	
2	Program Dukungan Manajemen	SP 6	Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam	IKP 11	Indeks Perencanaan Pembangunan	Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan
				IKP 12	Indeks Indeks kualitas kebijakan	
				IKP 13	Indeks SPBE	
				IKP 14	IKM pengguna layanan PTSP	
		SP 7	Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam	IKP 15	Indeks Reformasi Birokrasi	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan
				IKP 16	Indeks Sistem Merit	
				IKP 17	Indeks Maturitas SPIP	
				IKP 18	Opini BPK	

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikatornya serta Identifikasi Risiko Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:





BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	41
Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam	50
Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis	53
Wilayah Penataan dan Pengembangan	55
Proyek Strategis Nasional	56
Sektor Prioritas Pengembangan Infrastruktur	59
Kerangka Regulasi	74
Kerangka Kelembagaan	77

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan RPJPN dan RPJMN

Cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tercermin dalam RPJPN 2025-2045 yang secara menyeluruh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

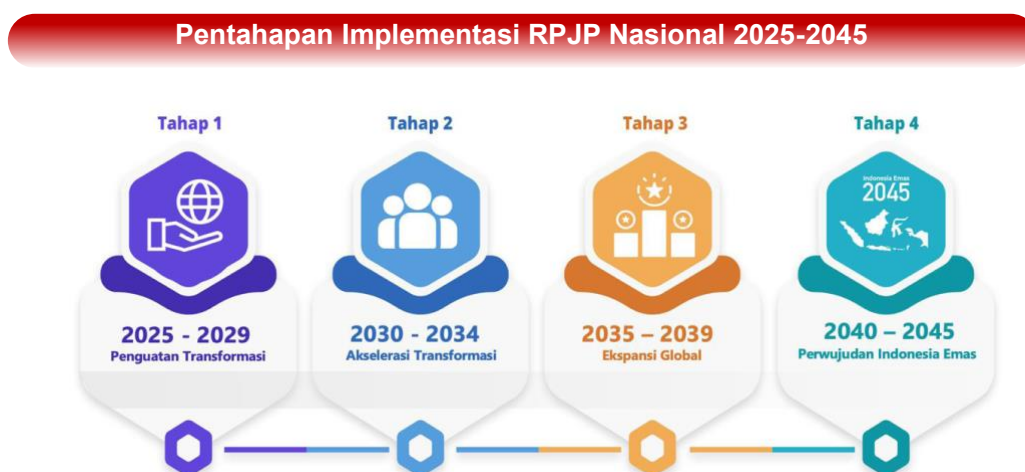
RPJPN 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Agenda Pembangunan yang selanjutnya diturunkan menjadi 17 (tujuh belas) Arah (tujuan) Pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan. Lebih lanjut terdapat 5 (lima) sasaran visi RPJPN yang terdiri dari: (1) Pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.



Gambar 3.1. Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024

Pentahapan pembangunan jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Indonesia emas 2045 yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2. Tahapan Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga pencapaian target pada RPJMN ini menjadi titik awal serta penentu keberhasilan pencapaian target RPJPN. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 melalui Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Negara Maju di tahun 2045.

Visi tersebut akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita atau menjadi Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029, yaitu:



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

- | | |
|--|--|
| <p>PRIORITAS NASIONAL 1</p> <p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 5</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 2</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 6</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 3</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 7</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 4</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 8</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |

Gambar 3.3. Asta Cita dan Prioritas Nasional 2025-2029

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025

Selanjutnya Asta Cita akan didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program *Quick Wins*, dan 320 Program Kerja, adapun 17 Program Prioritas yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;

13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan. Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada capaian Sasaran Pembangunan Nasional sebagai berikut:



Gambar 3.4. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025

Terdapat 8 program hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) dalam RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Berikut visual visi, misi, program prioritas, program hasil terbaik cepat, dan program kerja Pembangunan RPJMN 2025-2029:



Gambar 3.5. Visi Misi, Program Prioritas Presiden dalam RPJMN

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025

Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, BP Batam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 3 yaitu “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi”. Visualisasi prioritas nasional, program prioritas nasional, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja BP Batam sebagai berikut:



Gambar 3.6. Prioritas Nasional 3

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN utamanya terkait arah pembangunan wilayah Sumatera yang memiliki tema “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan” dan sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di KPBPB Batam telah ditetapkan lokasi prioritas dan *highlight* indikasi intervensi pemerintah diantaranya sebagai berikut:

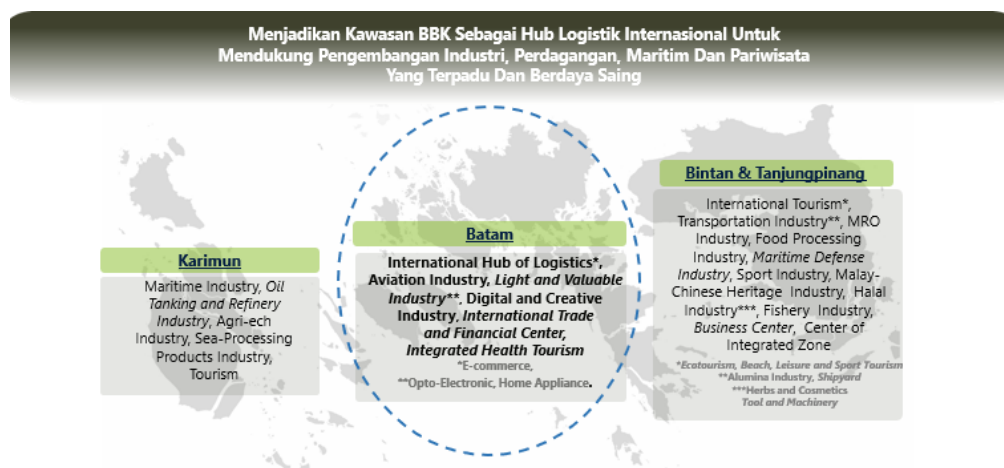
1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam melalui penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang terintegrasi.
2. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan terintegrasi Jalan Tol Batam-Bintan.
3. Pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun (sektor industri prioritas: semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal).

4. Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil.
5. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjung Pinggir-Jodoh.
6. Pengembangan Kawasan Terpadu *Rempang Ecocity*.
7. Pengembangan Kawasan Terpadu Galang *Maritime City*.
8. Pengembangan KEK Batam *Aero Technic*, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh.
9. Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas.
10. Pembangunan *Closing Dam* Piayu.
11. Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru.
12. Pengembangan CBD-TOD Teluk Tering-Batam Center.
13. Pengembangan SPAM Regional Batam.
14. Pengembangan *Batam Urban dan Industrial Sewerage System Development Project*.
15. Perencanaan, persiapan, dan pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar dan BRT Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Ugang, yang terintegrasi dengan TOD.
16. Pembangunan TPST Regional Batam.
17. Pengembangan kawasan pariwisata Batam (Pengembangan Kawasan MICE dan *Urban Tourism* Batam Center).
18. Pembangunan PLTS Apung Waduk Duriangkang.
19. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi.
20. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

3.1.2 Arah Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK) secara geostrategis merupakan suatu kawasan yang berada di Selat Malaka sebagai jalur logistik dan perdagangan internasional sekaligus jalur utama untuk masuknya investasi, barang, dan jasa serta pusat pertumbuhan dan penyaluran barang ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu,

pada masa yang akan datang Kawasan BBK juga diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan bernilai tambah besar. Hal inilah yang membuat Kawasan BBK dinilai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis dan menjanjikan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional. Untuk itu ditetapkan Visi Pengembangan Kawasan BBK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun adalah **“Kawasan BBK sebagai hub logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing”**.



Gambar 3.7. Visi Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024



Gambar 3.8. Tahapan Pengembangan Sektor Industri Utama

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Dalam Rinduk BBK juga telah menerjemahkan visinya kedalam pengembangan sektor industri utama yang dikembangkan di masing-masing wilayah dimana pada wilayah Batam sektor pengembangan industri utamanya adalah:

1. Industri Hub Logistik Internasional

Kawasan Batam memiliki posisi geostrategis yang baik dalam konteks nasional maupun internasional. Terletak di perairan Selat Malaka, Kawasan Batam akan dikembangkan sebagai Hub Logistik Internasional yang memiliki peran strategis dalam perdagangan dan rantai suplai global. Salah satu pendekatan dalam pengembangan bisnis unggulan di Kawasan Batam adalah dengan mengembangkan Batam sebagai kawasan logistik. Kawasan tersebut akan berperan sebagai penghantar barang masuk dan keluar yang diperlukan bagi kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata. Untuk barang yang bervolume besar dan berat akan memanfaatkan pelabuhan laut, sedangkan untuk barang yang ringan dan bernilai tinggi dan penghantaran cepat akan memanfaatkan bandara internasional.

2. Industri Kedirgantaraan

Industri kedirgantaraan, termasuk industri MRO, merupakan sektor yang saat ini berkembang pesat di dunia. Perkembangan pasar MRO diproyeksikan terus tumbuh di beberapa bagian negara, salah satunya Asia Pasifik. Kondisi ini akan memberikan peluang bagi industri kedirgantaraan di Indonesia.

3. Industri Ringan dan Bernilai (Optoelektronik, Peralatan Rumah Tangga)

Industri ringan dan bernilai merupakan industri yang dianggap paling sesuai untuk dikembangkan di Kawasan Batam. Industri ini membutuhkan lebih sedikit bahan mentah, ruang, dan tenaga. Jenis industri ringan dan bernilai yang akan dikembangkan di Kawasan Batam di antaranya adalah **optoelektronik**. Industri ini berkembang sangat pesat terutama pada sebagian barang elektronik menggunakan optoelektronik sebagai material utamanya. Industri optoelektronik mengalami peningkatan permintaan yang besar di skala global di mana saat ini elektronik menjadi suatu kebutuhan dan gaya hidup, sehingga permintaannya di pasar diproyeksikan terus meningkat.

4. Industri Digital dan Kreatif

Industri digital dan kreatif merupakan industri yang memiliki potensi sangat tinggi, mengingat kemajuan teknologi dan globalisasi yang membentuk jenis industri baru. Industri kreatif memberikan kontribusi besar terhadap PDB yang mencapai 1 triliun rupiah. Teknologi yang terus berkembang dapat mendorong

tumbuhnya ekonomi kreatif. Kompetensi teknis seperti pemrograman, data sains, keamanan dunia maya, pengintegrasian sistem, serta desain dan pemodelan animasi menjadi modal utama para pelaku industri kreatif digital.

5. Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional

Kawasan pusat bisnis/ *Central Business District* (CBD) merupakan kawasan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas publik dengan kegiatan keuangan seperti bandara internasional, pariwisata, bisnis, wilayah perkantoran, ritel atau mall, apartemen, kawasan hunian elit, dan hotel bintang enam, serta adanya ruang publik yang memadai dan ramah lingkungan. Salah satu yang akan dikembangkan dalam CBD adalah Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional. Kawasan Batam memungkinkan untuk dikembangkan sebagai Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yang memberikan ruang dan pelayanan berkelas internasional untuk dapat menarik investor dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yang berada dalam CBD menjadi daya tarik tersendiri dengan kelengkapan fasilitasnya yang modern, terintegrasi, dan kegiatan bisnis yang heterogen. Kawasan Batam yang direncanakan sebagai Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional yaitu CBD Pantai Barat dan CBD Teluk Tering Batam Center.

6. Pariwisata Kesehatan Internasional

Kawasan Pariwisata menjadi salah satu daya tarik investasi di Kawasan Batam. Kawasan Batam memiliki kelengkapan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kawasan BBK. Sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan berkualitas internasional akan memiliki potensi besar. Rumah Sakit BP Batam dan sekitarnya memiliki keunggulan lokasi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan jasa kesehatan internasional terintegrasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam

Dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional berupa Asta Cita sebagai Prioritas Nasional serta Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah, maka BP Batam akan fokus dalam upaya menjadi kontributor peningkatan ekonomi nasional. Untuk itu disusun strategi dan arah kebijakan BP Batam dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui

peningkatan nilai ekonomi dan investasi serta upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif serta penerapan reformasi birokrasi demi tercapainya profesionalitas dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

3.2.1 Arah Kebijakan BP Batam

Pengelolaan dan pengembangan KPBPB Batam yang dilakukan oleh BP Batam diarahkan tidak hanya difokuskan kepada pengembangan Batam sebagai kawasan ekonomi yang handal akan tetapi menjadi salah satu kontributor pembangunan ekonomi nasional dengan memperhatikan suatu pengembangan wilayah ekonomi dan investasi yang terencana. Oleh karena itu pengelolaan KPBPB Batam perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan ekonomi dan investasi dengan tata kota/kawasan yang berpedoman untuk meningkatkan nilai tambah seluruh sektor yang mengacu pada segala aspek aktivitas ekonomi, investasi, sosial, lingkungan, potensi kewilayahan dan perairan serta daya dukung KPBPB Batam.

Adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam sehingga diperlukan upaya untuk peningkatan ekonomi melalui fokus pada pemulihan industri, investasi, dan pariwisata.

Arah kebijakan dan strategi BP Batam dalam 5 (lima) tahun mendatang disusun dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam dalam pengelolaan dan pengembangan KPBPB. BP Batam menetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan.

Optimalisasi peningkatan investasi bertujuan menjadikan KPBPB Batam sebagai tujuan investasi di Indonesia, sehingga BP Batam mengupayakannya melalui promosi yang terarah dan terukur dengan menyampaikan kemudahan dan kelebihan yang dimiliki KPBPB Batam yang menjadikan magnet investasi yang menarik di Indonesia. Upaya lebih lanjut untuk mendukung hal tersebut di antaranya dilakukan dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur berupa prasarana dan sarana agar lebih memperlancar konektivitas dan distribusi barang dari pelabuhan/bandara menuju kawasan industri dan sebaliknya dalam mewujudkan KPBPB Batam sebagai kawasan industri berorientasi ekspor. Sejalan

dengan hal tersebut infrastruktur yang dibangun juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu BP Batam juga akan mengupayakan pengembangan kawasan pusat perdagangan, ekosistem bisnis dan industri keuangan pada lokasi yang direncanakan.

2. Meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.

Peningkatan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang berkualitas, akuntabel, efisien, dan melayani bertujuan untuk menjadikan BP Batam sebagai organisasi yang kredibel menjalankan fungsinya dalam pengembangan kawasan strategis KPBPB Batam. Adapun hal ini akan dilakukan di antaranya melalui peningkatan kualitas perencanaan yang tetap diawasi hingga tahap implementasi sehingga tercapai pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Sejalan dengan hal tersebut BP Batam juga mengupayakan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha di KPBPB Batam serta pengelolaan keuangan BP Batam yang memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Di samping itu arah kebijakan ini juga dicapai melalui peningkatan profesionalitas pegawai BP Batam.

3.2.2 Strategi BP Batam

1. Strategi untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan.

- a. Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: Hub Logistik Internasional, Kedirgantaraan, Light and Valuable, Digital dan Kreatif, Perdagangan Internasional dan Finance Center, dan Integrated Health Tourism;
- b. Pengembangan kawasan strategis prioritas di Batam dalam kerangka wilayah penataan dan pengembangan (WPP);
- c. Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing; dan
- d. Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam.

Untuk mewujudkan strategi di atas, BP Batam akan melakukan langkah konkret, di bawah ini:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan berinvestasi di KPBPB Batam;
- b. Mengembangkan kluster – kluster industri ramah lingkungan, terintegrasi dan terkoneksi;
- c. Mengoptimalkan penggunaan lahan yang efektif dan efisien;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung investasi berbasis pengembangan kewilayahan;
- e. Penguatan sistem konektivitas antar kawasan industri;
- f. Mewujudkan sistem transportasi masal antar dan intra wilayah; dan
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan aset di BP Batam untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan.

2. Strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.

- a. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan; dan
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

Untuk mewujudkan strategi di atas, BP Batam akan melakukan langkah konkret di bawah ini:

- a. Menyusun dokumen perencanaan berkualitas yang berpedoman pada RPJMN guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI;
- b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah di BP Batam;
- c. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai di BP Batam guna mendukung fungsi pengembangan KPBPB Batam; dan
- d. Pengelolaan keuangan BP Batam yang memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik.

3.3 Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dengan potensi investasi tinggi dalam mendukung pembangunan kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan visi pengembangan Kawasan BBK;

- b. Kesesuaian dengan bisnis unggulan Kawasan BBK;
- c. Memiliki potensi nilai investasi tinggi;
- d. Memiliki potensi ekspor;
- e. Memiliki potensi pertumbuhan ekonomi cepat tumbuh yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional; dan
- f. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan keunggulan kawasan.

Setelah dilakukan proses identifikasi Kawasan Strategis berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 17 Kawasan Strategis pengembangan KPBPB Batam yang selanjutnya pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2025-2029 dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan yaitu Batam, Rempang, dan Galang dengan fokus wilayah yaitu :

1. Kawasan Pulau Batam, dengan Program Wilayah Penetaan dan Pengabengan (WPP);
2. Kawasan Pulau Rempang, dengan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang *Eco City*; dan
3. Kawasan Pulau Galang, dengan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Wiraraja *Green Renewable Energy And Smart-Eco Industrial Park* (GESEIP).

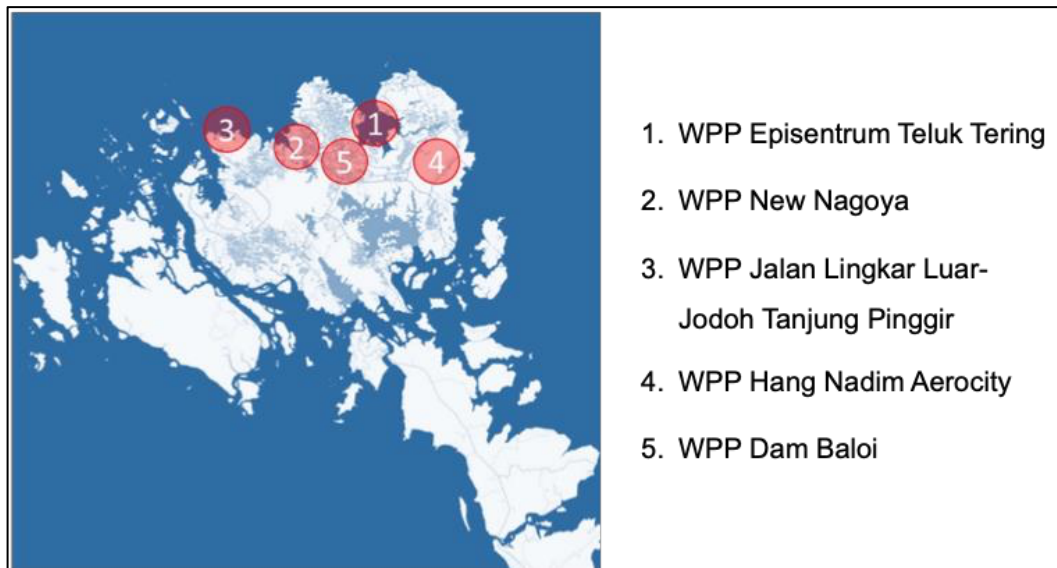
3.3.1 Wilayah Penataan dan Pengembangan

Wilayah Penataan dan Pengembangan atau disingkat WPP merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis yang berada di kawasan Pulau Batam di bagian Utara dan menjadi wajah Batam menghadap Singapura dan Johor Malaysia yang sangat potensial untuk dilakukan penataan dan pengembangan agar lebih menarik bagi investor dan wisatawan.

Konsep penataan dan pengembangan kawasan beragam disesuaikan dengan potensi yang ada mulai dari Kawasan Bisnis Terintegrasi atau *Central Business District* (CBD), Pusat Keuangan (*financial centre*), Pusat Transportasi Intra Moda, Komersil, *Heritage*, Pariwisata, *Coastal Area*, Pelabuhan Internasional dan *Cruise*, dan *Aerocity*.

Metodenya menggunakan perencanaan partisipatif dengan melibatkan tim atau tenaga ahli/professional, dunia usaha dan masyarakat sekitar, sementara itu untuk

skema pembiayaan menggunakan *Land Value Capture* (LVC), KPBU dan CSR. Adapun WWP terdiri dari 5 (lima) wilayah sebagai berikut:



Gambar 3.9. Wilayah Penataan dan Pengembangan KPBPB Batam

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

1. WPP Episentrum Teluk Tering

Meliputi 4 (empat) kawasan yaitu:

- Kawasan Reklamasi Teluk Tering;
- Kawasan Bengkong dan Sekitarnya;
- Kawasan Tering Bay dan Sekitarnya; dan
- Kawasan Batam Core.

2. WPP New Nagoya

Meliputi 2 (dua) kawasan yaitu:

- Kawasan Heritage Nagoya; dan
- Kawasan New Nagoya.

3. WPP Jalan Lingkar Luar - Jodoh Tanjung Pinggir

Meliputi 3 (tiga) kawasan yaitu:

- Kawasan Jodoh - Harbour Bay; dan
- Jalan Lingkar Luar
- Pelabuhan Sekupang

4. WPP Hang Nadim Aerocity

Meliputi Kawasan Operasional Bandara

5. WPP Dam Baloi

3.3.2 Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional (PSN) termuat dalam RPJMN 2025-2029 yang dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN khususnya Program Prioritas Presiden.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional ditetapkan setiap tahunnya melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden.

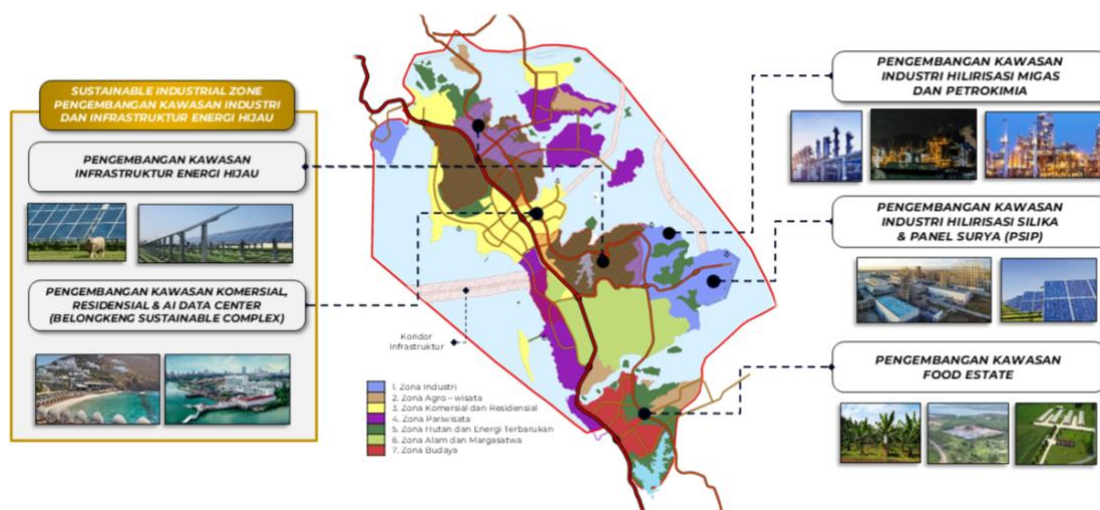
Berdasarkan hal tersebut, saat ini terdapat 2 (dua) Proyek Strategis Nasional (PSN) di KPBPB Batam yaitu PSN Rempang *Eco City*, dan PSN Kawasan Industri Wiraraja *Green Renewable Energy And Smart-Eco Industrial Park* (GESEIP).

1. PSN Rempang Eco City

Pulau Rempang dikembangkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan cakupan wilayah darat seluas 22.115 hektare dan wilayah laut seluas 20.803 hektare. Kawasan Rempang Eco-City telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Pengembangan Kawasan Rempang dirancang dalam tujuh zona utama, yang mencakup Zona Kawasan Industri, Zona Agro-Wisata, Zona Komersial dan Residensial, Zona Pariwisata, Zona Alam dan Margasatwa, serta Zona Budaya.

Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City dalam difokuskan pada beberapa kegiatan prioritas utama, diantaranya Pengembangan Kawasan Industri dan Infrastruktur Energi Hijau (Sustainable Industrial Zone), yang terdiri dari pembangunan Belongkeng Sustainable Complex (meliputi pusat pelatihan, Data Center) serta Kawasan Infrastruktur Energi Hijau (PLTS), yang terintegrasi dengan fasilitas komersial, residensial, dan pelabuhan pendukung. Keseluruhan inisiatif ini dirancang untuk membentuk suatu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis teknologi hijau dengan nilai investasi sekitar USD 9 miliar yang sejalan dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura pada tanggal 16 Juni 2025 diantaranya terkait Kerjasama Pembangunan Kawasan Industri Berkelanjutan dan Kerjasama

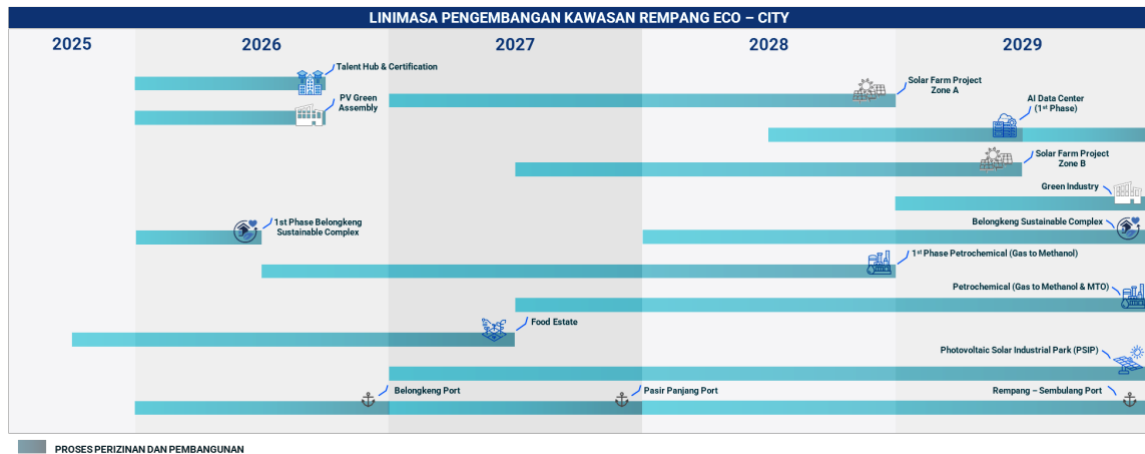
Interkoneksi Perdagangan Listrik Lintas Batas. Selanjutnya, pengembangan Kawasan Industri Hilirisasi Migas dan Petrokimia di sisi timur Rempang, diarahkan untuk menangkap peluang pasar industri berbasis gas bumi, antara lain pengolahan menjadi Methanol dan produk turunan lainnya. Investasi pada kawasan ini diperkirakan mencapai USD 2,77 miliar, di luar kebutuhan pembangunan pipa gas dari Blok Natuna maupun jalur Grissik-Pemping.



Gambar 3.10. Pengembangan Rempang Eco City

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis, 2025

Pengembangan Kawasan Industri berbasis energi baru terbarukan lainnya yaitu pembangunan Photovoltaic Solar Industrial Park (PSIP) di Sembulang, dengan estimasi nilai investasi sekitar USD 11 miliar. Kawasan ini akan menjadi pusat hilirisasi silika dan produksi panel surya, yang dapat terintegrasi dengan kebutuhan solar panel untuk PLTS di Kawasan Rempang. Selain berfokus pada pembangunan industri dan infrastruktur hijau, Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui pengembangan Food Estate di Galang, tenaga kerja lokal akan dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan terintegrasi. Dengan demikian, Rempang Eco-City dapat menjadi contoh sinergi antara pembangunan kawasan modern dengan penguatan ketahanan pangan nasional.



Gambar 3.11. Linimasa Pengembangan Rempang Eco City

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis, 2025

Rempang Eco-City memiliki kedudukan strategis yang menjadikannya kawasan unggulan untuk investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Pengembangannya diproyeksikan memberi dampak signifikan melalui multiplier effect terhadap perekonomian, dengan potensi peningkatan PDB nasional sebanyak 1,95 kali dan peningkatan PDRB Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1,3 kali dari perputaran ekonomi yang terciptakan. Selain itu, kawasan ini diperkirakan mampu menciptakan peluang kerja baru, baik pada tahap konstruksi maupun operasional, dengan estimasi penyerapan sekitar 186.000 tenaga kerja, sekaligus mendorong peningkatan keterampilan sumber daya manusia lokal.

2. PSN Kawasan Industri Wiraraja – GESEIP

Kawasan Industri Wiraraja *Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park* (GESEIP) dirancang untuk menjadi pusat bagi industri yang berfokus pada produk dan proses yang ramah lingkungan. GESEIP mengusung konsep "*Smart-Eco*", yang mengintegrasikan teknologi canggih dalam pengelolaan kawasan industri. Konsep ini mencakup sistem manajemen energi yang efisien, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi *IoT* (*Internet of Things*) untuk mendukung operasional industri yang berkelanjutan. Kawasan industri ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dalam rangka mendukung pencapaian target Energi Baru Terbarukan Indonesia yaitu paling sedikit sebesar 23% pada tahun 2025.

Pengembangan GESEIP merupakan PSN yang diharapkan mampu menjadi pemicu dalam transisi ekonomi dari kegiatan padat karya dan berproduktivitas rendah ke kegiatan padat keterampilan dan berproduktivitas tinggi. Area lokasi PSN Kawasan Industri Wiraraja GESEIP akan dibangun diatas lahan seluas 989 Ha. Melalui PSN ini, akan menambah nilai investasi baru sebesar Rp226 triliun yang berasal dari Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) maupun dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari Amerika Serikat, Jerman, Taiwan, dan Singapura. Selain itu, melalui GESEIP juga akan menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 36.150 orang.

Dengan nilai investasi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Pulau Galang dan Galang Baru dan secara luas di wilayah Kepulauan Riau, maka sebagai salah satu upaya BP Batam dalam rencana pengembangan Kawasan GESEIP yaitu dengan menyediakan infrastruktur utama untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke pusat-pusat aktivitas ekonomi dan komersial yang ada di sepanjang kawasan. Secara keseluruhan, GESEIP merupakan PSN yang bertujuan untuk menggabungkan pertumbuhan industri dengan prinsip keberlanjutan dan inovasi teknologi, sekaligus menjadi model kawasan industri masa depan di Indonesia.



Gambar 3.12. Zona Kawasan Galang

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

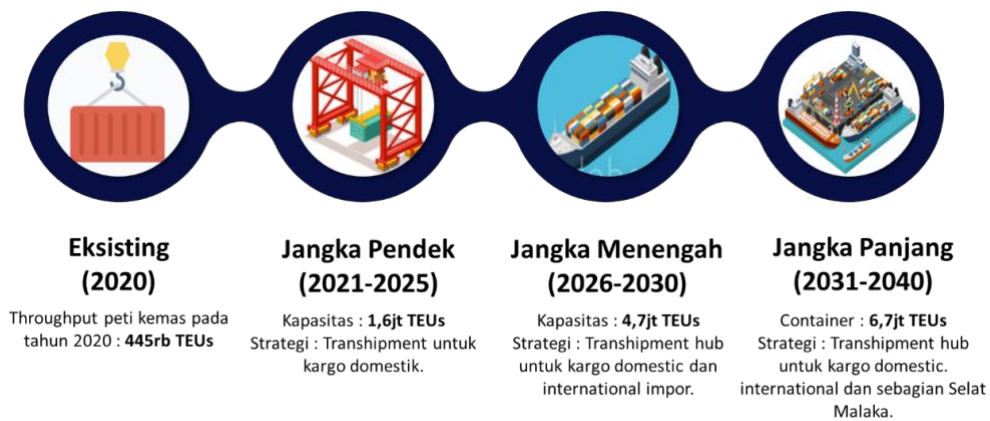
3.4 Sektor Prioritas Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Batam mampu mendorong kemajuan KPBPB Batam ke arah yang lebih baik, bahkan menjadikan prioritas bagi sebuah wilayah yang memiliki potensi ekonomi seperti Batam. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing kawasan. Infrastruktur yang baik juga mampu melancarkan distribusi dan mobilitas barang, baik pengangkutan bahan mentah maupun barang akhir.

BP Batam memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan infrastruktur KPBPB Batam sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan Batam. Pembangunan infrastruktur berskala internasional seperti Pelabuhan Laut (barang dan penumpang), Bandar Udara, penyedia air bersih, Rumah Sakit, jalan dan drainase, fasilitas lingkungan dan aset-aset produktif BP Batam sehingga diharapkan menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Batam dan merangsang pertumbuhan ekonomi di Batam. Selain itu, dengan pengembangan infrastruktur dan aset-aset yang dimiliki BP Batam, akan mendapatkan timbal balik berupa pendapatan yang didapatkan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun pada tahun 2025-2029, BP Batam akan mengembangkan infrastruktur dan aset dibawah ini:

a. Pengembangan Pelabuhan Laut (Batu Ampar)

Batam yang berada di lintasan perniagaan antara Samudera Hindia-Samudera Pasifik dan Benua Utara-Benua Selatan dan memiliki akses hub perdagangan internasional ke Singapura yang berjarak 20 km sehingga Batam memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan kawasan ekonomi lain di Indonesia. Untuk memanfaatkan hal tersebut BP Batam telah memacu pembangunan dan fasilitas Pelabuhan Batu Ampar sebagai pintu gerbang keluar masuk logistik dari berbagai negara, namun Pelabuhan Batu Ampar masih harus dikembangkan sampai dengan kapasitas maksimum yang dibagi dalam tahapan pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Rencana Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.13. Tahapan Rencana Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025



Gambar 3.14. Rencana Pengembangan Terminal Batu Ampar Ultimate

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis, 2025

Untuk mencapai target jangka menengah berupa peningkatan kapasitas kontainer sebesar 4,7 juta TEUs pada tahun 2030, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar akan berfokus pada peningkatan fasilitas di Dermaga Utara diantaranya pengerukan kolam (-16 mLWS), pembangunan *container yard* (Reklamasi), pengadaan peralatan pendukung bongkar muat untuk mengurangi waktu tunggu bongkar muat kapal (*dwelling time*).



Gambar 3.15. Rencana Pengembangan Terminal Pelabuhan Batu Ampar Jangka Menengah (2026-2030)

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

b. Pengembangan Bandara Hang Nadim

Pengembangan Bandara Hang Nadim merupakan *milestone* pembangunan bagi kawasan-kawasan strategis lainnya di Kota Batam. Bandara Hang Nadim merupakan hub utama dalam menstimulasi investasi ekonomi, mempromosikan pariwisata dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil perencanaan Masterplan, Development Plan dan Pra Studi Kelayakan Bandara Hang Nadim. Kawasan Bandara akan menjadi pintu utama dari pengembangan kawasan Kota Batam secara keseluruhan dalam mencapai tujuan pengembangan ke depan sebagai Kota logistik, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.



Gambar 3.16. Tahapan Rencana Pengembangan Bandara Hang Nadim

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis, 2025

Pengembangan Bandara Hang Nadim dibagi menjadi 3 tahap pengembangan, yaitu:

a. Tahap 1 tahun 2021-2031

Fokusnya adalah Pengembangan Terminal Kargo tahap 1, Pengembangan Terminal 2, Pengembangan Apron Terminal Penumpang, Isolated Area Runway 1.

b. Tahap 2 tahun 2032-2041

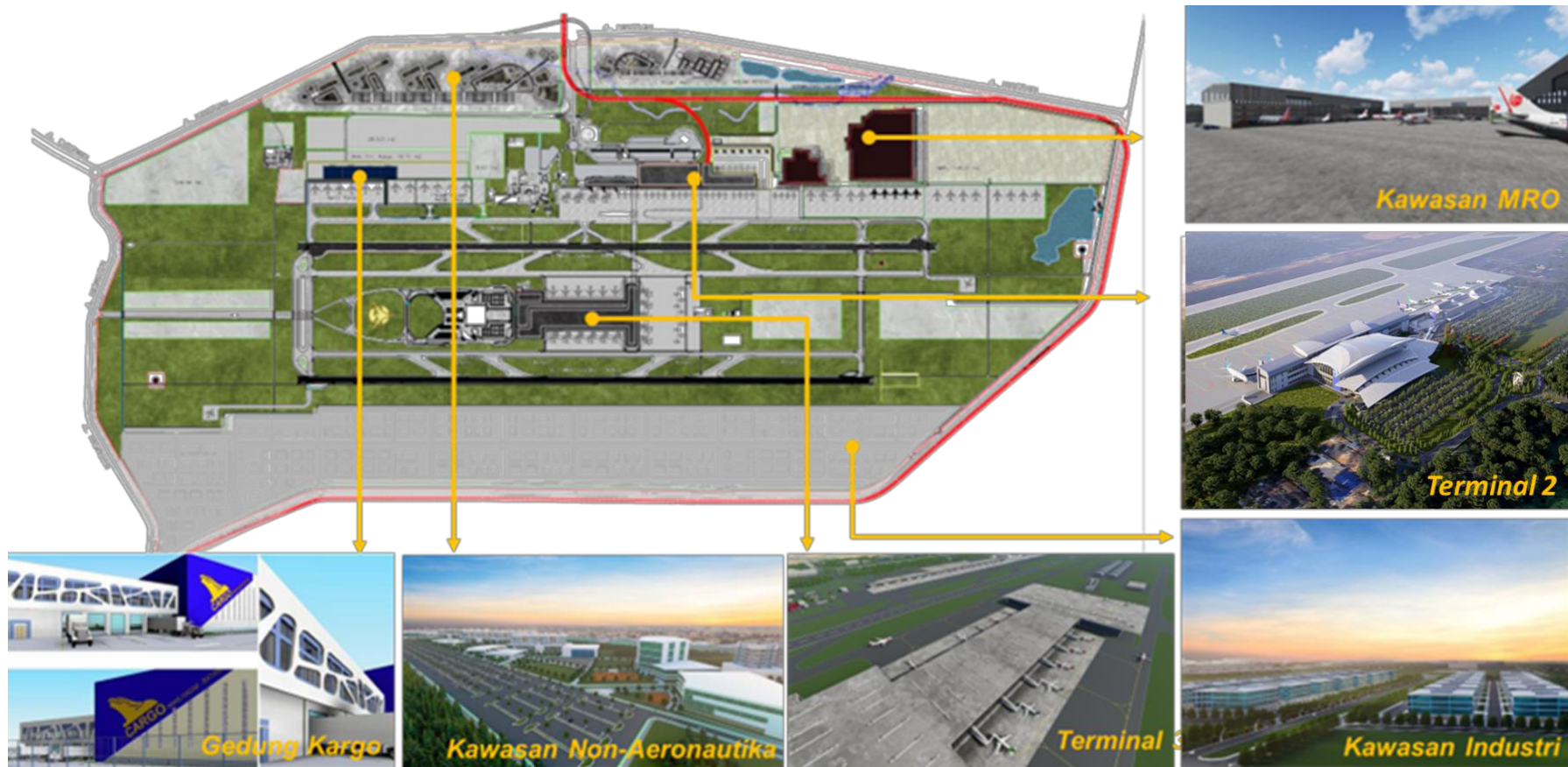
Fokusnya adalah Pengembangan Ultimate Terminal 2, Pengembangan Apron Kargo dan MRO, Pengembangan Terminal Kargo tahap 2, Pengembangan Parallel Taxiway runway 1.

c. Tahap 3 tahun 2042-2055

Fokusnya adalah Pengembangan Terminal 3 (ultimate), Pengembangan Parallel Taxiway, Pengembangan Apron Kargo, Pengembangan Terminal Kargo ultimate.

Pada tahun 2022 pengelolaan dan pengembangan Bandara Hang Nadim telah dikerjasamakan dengan mekanisme KPBU oleh BP Batam dengan PT. Bandara Internasional Batam (BIB) yang merupakan Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I, Incheon Internasional Airport Corporation (IIAC) Korea Selatan, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA. Jangka waktu kerja sama selama 25 tahun dengan total investasi Rp6,9 triliun, dimana dalam tahap pertama akan dibangun terminal 2, pengembangan terminal kargo tahap 1, serta isolated runway.

Diharapkan dengan terbangunnya terminal 2 bisa meningkatkan kapasitas bandara dari 3,9 juta menjadi 9,8 juta penumpang per tahun, disertai penambahan kapasitas parkir pesawat dari 24 menjadi 30. Pembangunan terminal kargo baru juga diharapkan bisa mewujudkan Batam sebagai hub kargo internasional, membuka akses pasar Asia Timur melalui kerja sama dengan Bandara Incheon Korea, serta mengambil sebagian pergerakan kargo yang selama ini masuk melalui Singapura.



Gambar 3.17. Rencana Pengembangan Bandara Hang Nadim Batam

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

c. Pengembangan Rumah Sakit BP Batam

Guna melengkapi fasilitas investasi agar Batam lebih menarik bagi investor dan untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, maka salah satu rencana jangka menengah BP Batam yaitu pengembangan infrastruktur fasilitas kesehatan Rumah Sakit Badan Pengusahaan yang terletak di Sekupang untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik, terpadu dan berkesinambungan. Rencana pengembangan tersebut memiliki layanan unggulan diantaranya *cardiovascular center*, *center of geriatric*, *women and fertility center*, *cancer center*, *cosmetic and plastic surgery*, dan *stem cell center*.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang memiliki luas 47,17 Ha berada di 2 (dua) lokasi yaitu Sekupang dengan luas 23,10 Ha dan Nongsa dengan luas 24,07 Ha. Adapun kegiatan utamanya antara lain:

1. *International hospital* dan *specialist center*;
2. Industri farmasi dan alat kesehatan;
3. *International Standardized Healthscare Shool*;
4. *Healing Garden*; dan
5. *Wellness Tourism*.

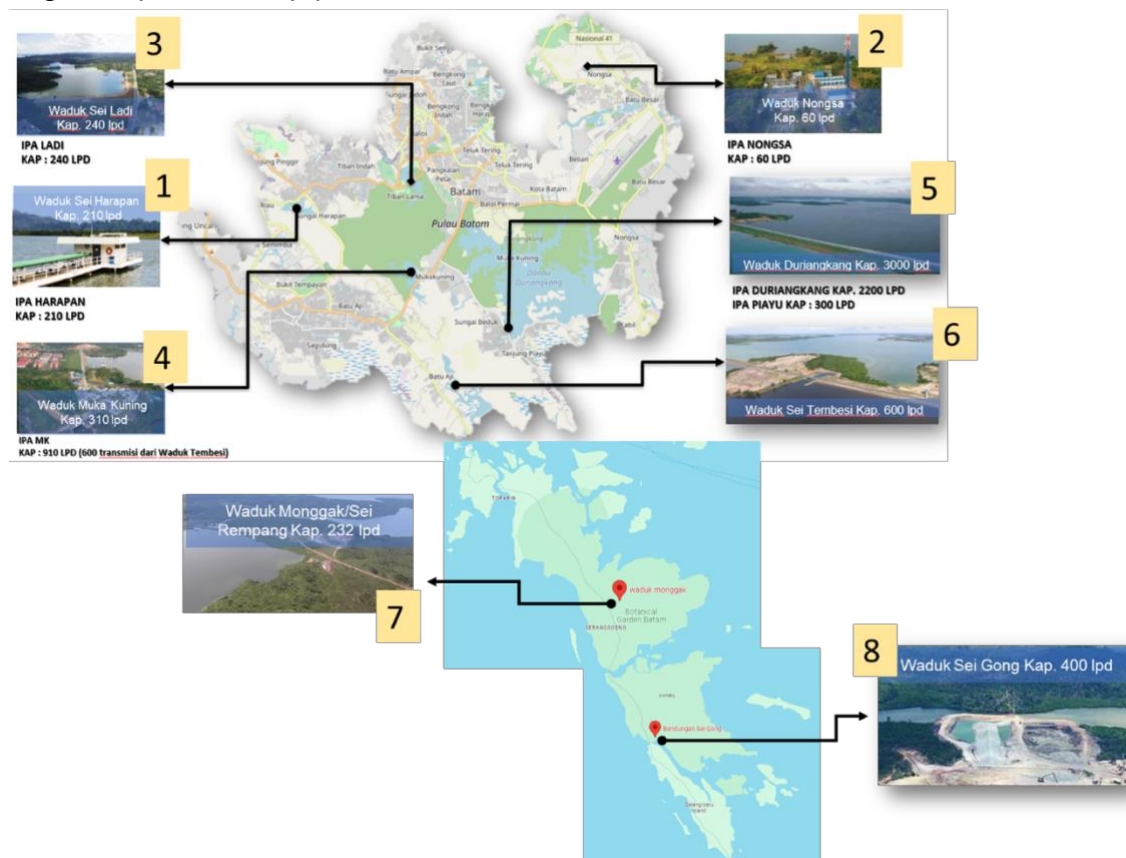


Gambar 3.18. Rencana Pengembangan Pariwisata dan Kesehatan Internasional Sekupang

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

d. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum

Kebutuhan air bersih di KPBPB Batam (Batam, Rempang dan Galang) akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun dengan persentase terbesar dibutuhkan oleh kegiatan industri dan pariwisata. Layanan air bersih di Batam bersumber dari 8 (delapan) Waduk yang tersebar di Batam sampai ke Galang. Pada tahun 2025 penggunaan air baku waduk telah mencapai kapasitas maksimumnya, hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2020-2024 untuk meningkatkan kapasitas produksi air baku dengan membangun beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau *Water Treatment Plant* (WTP) yang berlokasi di 3 (tiga) Waduk yaitu : Waduk Duriangkang kapasitas WTP 500 ltr/dtk, Waduk Mukakuning kapasitas WTP 350 ltr/dtk, dan Waduk Tembesi kapasitas WTP 230 ltr/dtk, namun saat ini masih terdapat *stress area* pada wilayah pelayanan karena belum optimalnya perpipaan distribusi yang ada sehingga program jangka menengah kedepan diperlukan kegiatan perkuatan pipa.



Gambar 3.19. Kapasitas Waduk di KPBPB Batam

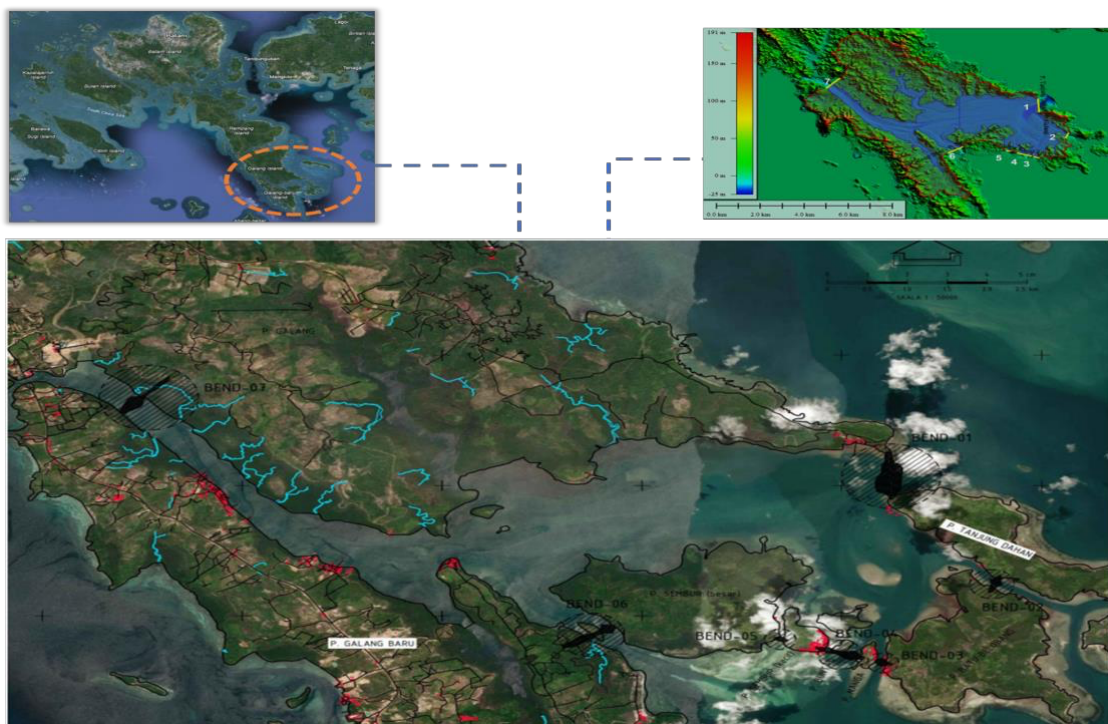
Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

Berdasarkan hasil perhitungan, proyeksi kebutuhan air baku di kawasan Barelang pada tahun 2030 yaitu sebesar 8505 liter/detik di tahun 2030. Dengan nilai proyeksi yang terus meningkat tiap tahunnya, maka dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi kondisi proyeksi tersebut.

Pembangunan sarana pendukung untuk meningkatkan kapasitas persediaan air baku dan air bersih terus dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan air baku dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air di Batam yang dilakukan dengan 3 (tiga) langkah revitalisasi dan optimasi *reservoir* sebagai berikut:

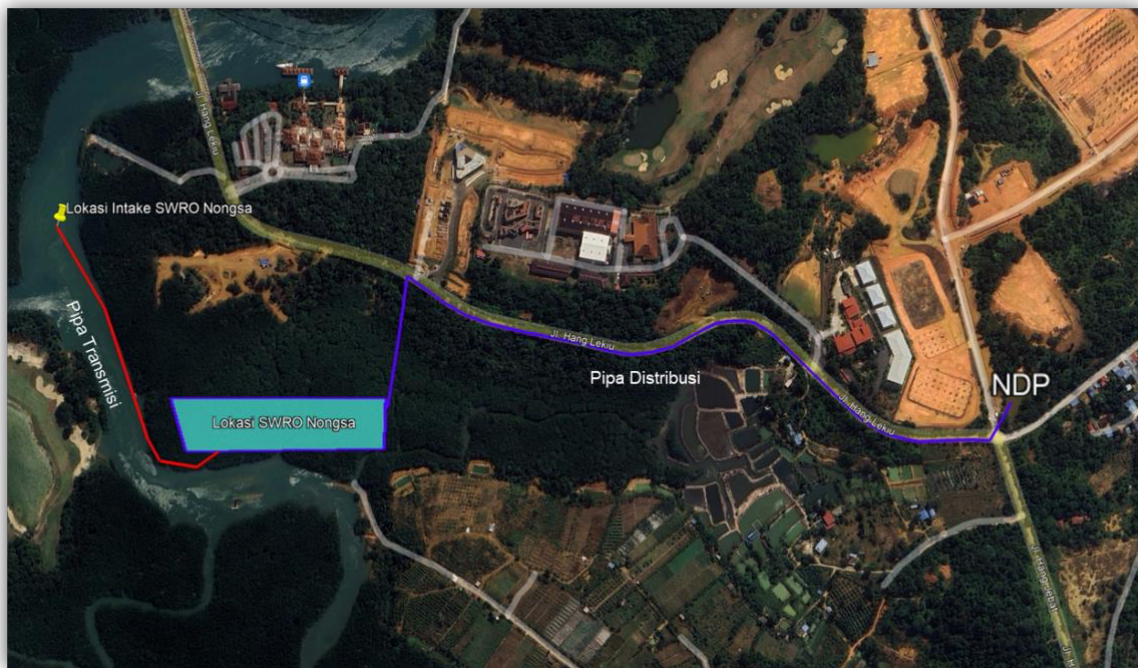
1. Rehabilitasi lahan yang akan dilaksanakan di daerah tangkapan dan resapan air untuk mengurangi limpasan permukaan pembawa material tanah;
2. Pengerukan sedimen di beberapa waduk; dan
3. Pembangunan *Stoplock Dam* untuk menambah kapasitas waduk.

Selain itu diperlukan upaya yang strategis untuk menjamin ketersediaan air bersih masa depan yaitu Pembuatan Waduk Laut Galang-Galang Baru kapasitas IPA 2.600 ltr/dtk dan *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) yang tahap pertama akan dilakukan di wilayah Nongsa dengan kapasitas 300 ltr/dtk.



Gambar 3.20. Waduk Laut Galang-Galang Baru

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025



Gambar 3.21 Lokasi SWRO Nongsa

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

e. Pengembangan Jalan dan Jembatan

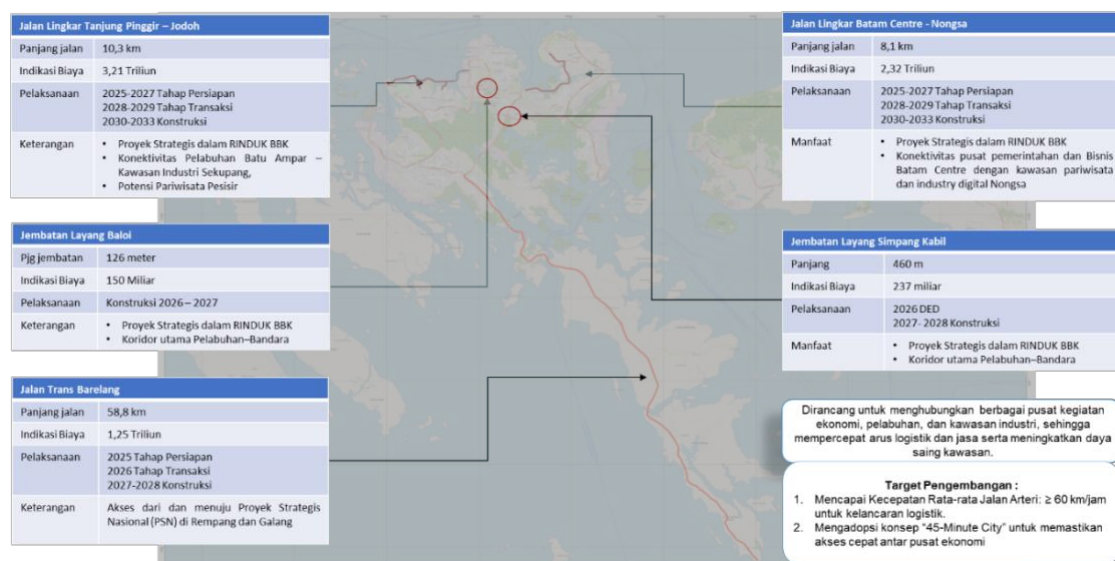
Pengembangan jalan koridor utama yang menghubungkan Pelabuhan Batu Ampar dengan Bandara Hang Nadim dilanjutkan sampai Kawasan Pariwisata Nongsa Batu Besar sepanjang 34 km dengan masing-masing jalur memiliki 5 lajur, sehingga aksesibilitas dari dan ke Pelabuhan, Bandara dan Kawasan Industri menjadi lebih lancar dan memperkecil waktu tempuh.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan agar konektivitas jalan semakin terhubung dengan baik, diperlukan pembangunan jalan alternatif khususnya di wilayah yang tingkat kepadatannya sudah mendekati over kapasitas yang menyebabkan terbatasnya akses menuju kawasan tersebut menjadi salah satu faktor arus lalu lintas yang padat pada jalan eksisting. Diharapkan dengan pembangunan jalan alternatif di wilayah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk melancarkan arus lalu lintas barang dan jasa yang terjadi pada daerah kawasan jalan tersebut, menguraikan kepadatan *traffic* serta meningkatkan pertumbuhan investasi di lokasi-lokasi terluar yang selama ini sulit untuk diakses, selain itu juga akan membuka daerah-daerah paling pinggir yang terhubung oleh jembatan, sehingga

terjadi arus transportasi & pemanfaatan lahan yang lebih baik serta dapat menghidupkan potensi pariwisata pesisir.

Lebih lanjut, diperlukan pembangunan *flyover* pada jalan koridor utama (Jalan Yos Sudarso) Pelabuhan-Bandara di dua titik yaitu simpang baloi dan simpang kabil untuk mengurangi *bottleneck* di ruas jalan tersebut. Sementara itu akses ke wilayah pengembangan kawasan ekonomi baru di Rempang dan Galang perlu ditingkatkan dari kondisinya saat ini yang sudah memiliki 1 jalur menjadi masing-masing jalur memiliki 2 lajur, sehingga dapat mengakomodir kendaraan berat menuju dan dari kawasan Rempang-Galang ke Batam terutama pada masa pemabangunan kawasan tersebut. Adapun rencana pengembangan jalan di Batam adalah sebagai berikut:

- Jalan Lingkar Tanjung Pinggir - Jodoh, sepanjang 10,3 kilometer;
- Jalan Lingkar Batam Centre - Nongsa, sepanjang 8,1 kilometer;
- Jembatan Layang Baloi, sepanjang 126 meter;
- Jembatan Layang Simpang Kabil, sepanjang 460 meter; dan
- Jalan Trans Barelang, sepanjang 58,8 km.



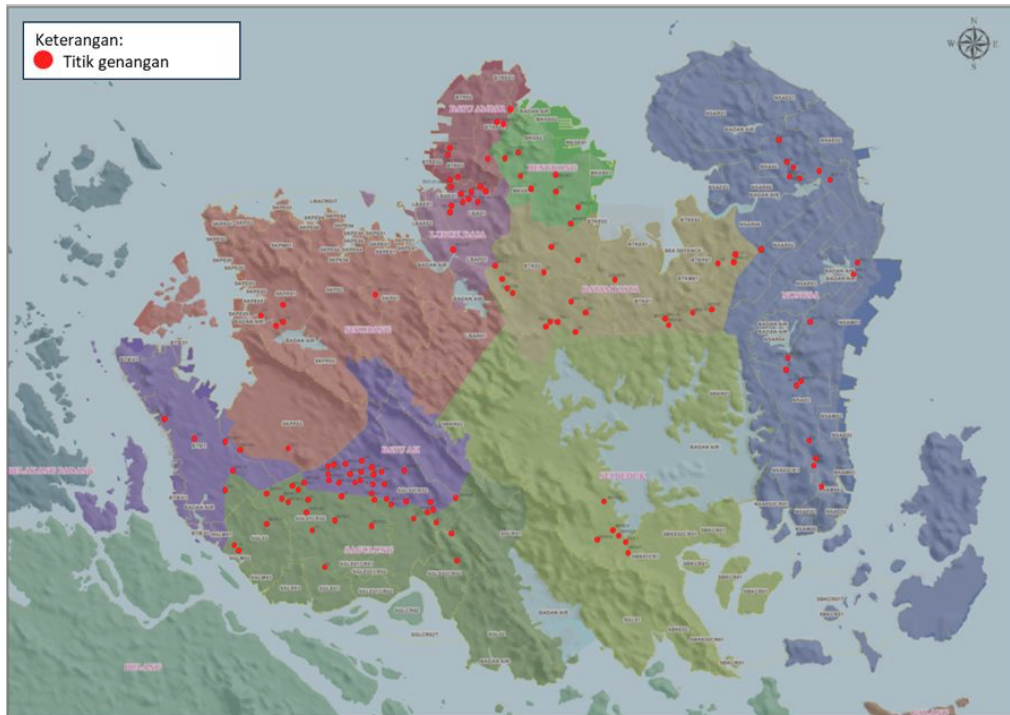
Gambar 3.22. Rencana Pengembangan Jalan di Batam

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis, 2025

f. Drainase (Penanggulangan Banjir)

Pengembangan infrastruktur sistem drainase di kawasan KPBPB Batam ditujukan sebagai pengendali banjir dengan manajemen pelimpasan air hujan

serta menambah potensi air baku. Pada tahun 2025 terdapat 133 titik genangan banjir yang tersebar di seluruh wilayah Batam yang mana 20 diantaranya merupakan titik prioritas yang perlu segera ditanggulangi meliputi area simpang kabil, kawasan industri tunas, sekitar kawasan industri panbil, drainase Jl. Trans Barelang, kawasan Nongsa, Jodoh, Bengkong, dan Marina.



Gambar 3.23. Lokasi Titik Genangan di Batam

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

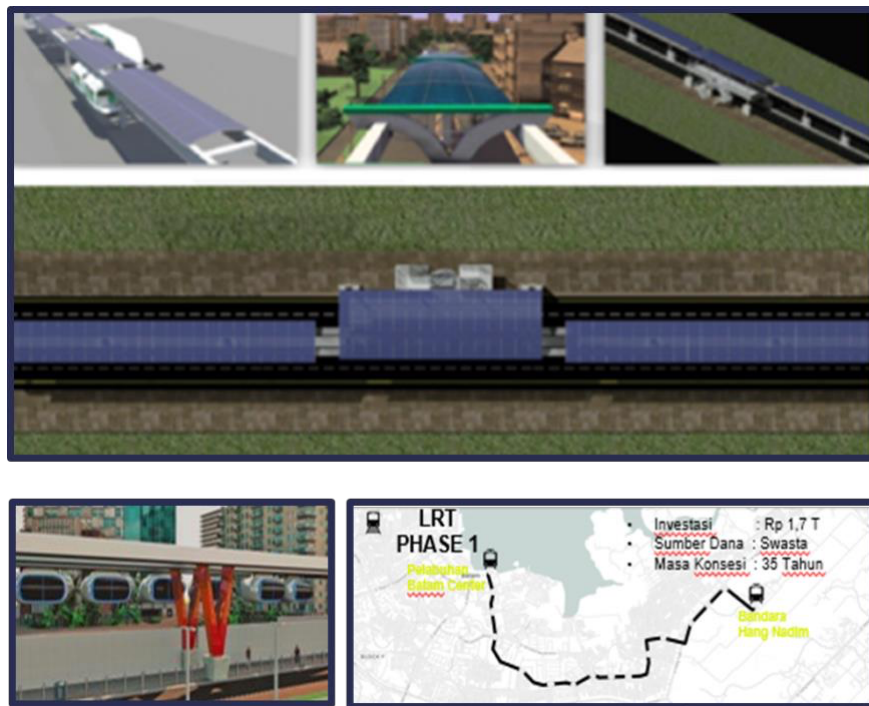
g. Pengembangan Fasilitas Lingkungan

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan pemisahan antara sistem saluran drainase dan sistem pengelolaan air limbah yang diselenggarakan secara bertahap. BP Batam mengembangkan pengelolaan air limbah rumah tangga & industri sebelum dibuang ke perairan laut.

Upaya yang dilakukan yaitu pengembangan infrastruktur *Wastewater Treatment Plant (WWTP)* atau IPAL dilakukan dengan perbaikan bangunan SDB, *incenerator* dan pintu gerbang IPAL serta perluasan kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) B3 Kabil, serta membangun IPAL terpusat baru untuk kebutuhan limbah domestik di Batam Center, Tanjung Uma, Sekupang, Tembesi, Telaga Punggur dan Kabil dan lokasi lainnya.

h. **Light Rapid Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT)**

Dalam rangka mendukung program peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi penggunaan transportasi massal yang bermanfaat dalam menghilangkan kemacetan, sekaligus pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon, serta terciptanya tata kota berorientasi *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi intermoda yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Batam, maka BP Batam merencanakan pembangunan LRT dan BRT.



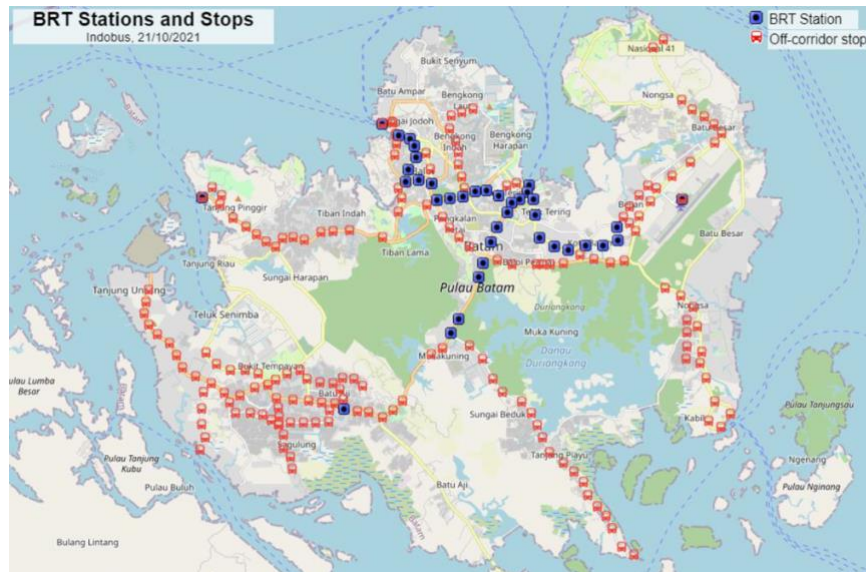
Gambar 3.24. Rencana Pengembangan *Light Rapid Transit* (LRT) di Batam

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

Pada tahap pertama, trase dengan panjang +-11 Km akan yang direncanakan akan menghubungkan Bandara Hang Nadim – Pelabuhan Batam Center. Trase ini akan mempermudah konektivitas pergerakan orang dan barang dalam sebuah jalur penghubung industri, pariwisata, dan logistik.

Dalam menjadikan Batam sebagai *Transit Oriented City* yakni sebuah kota yang pertumbuhan dan tata ruangnya dirancang agar aktivitas warganya terkonsentrasi disekitar jaringan transportasi publik tanpa bergantung pada kendaraan pribadi, BP Batam merencanakan pembagunan *Bus Rapid Transit* (BRT). Rencana pengembangan BRT Tahap 1 dan 2 akan menghubungkan Pelabuhan dan Bandara je pusat-pusat kota (Batam Center & Nagoya/Jodoh) serta menghubungkan pemukiman padat penduduk ke

tempat kerja (Batamindo, Batam Center, Nagoya/Jodoh), selain itu koridor BRT juga akan terintegrasi dengan rute Trans Batam yang telah beroperasi saat ini.



Gambar 3.25. Rencana *Bus Rapid Transit* (BRT) dan Integrasi dengan Trans Batam

Sumber: Pusat Perencanaan Program Strategis 2025

i. Pengembangan Aset Lainnya

BP Batam juga berfokus untuk melakukan pengembangan infrastruktur pada aset lainnya, meliputi:

1. Rumah Susun

Keberadaan kawasan permukiman memberikan pengaruh cukup besar pada tata bangunan, lingkungan dan wajah kota, sehingga perlu penanganan yang khusus. Konstelasi kawasan lainnya umumnya muncul di sekitar kawasan industri, di mana kebutuhan hunian untuk pekerja sektor industri seringkali mendorong terciptanya permukiman padat dan kumuh. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kualitas pemukiman atau rumah susun (rusun) di berbagai area seperti: rusun Muka Kuning, rusun Sekupang, rusun Tanjung Uncang, rusun Batu Ampar dan rusun Kabil.

2. Asrama Haji

Pengembangan infrastruktur asrama haji salah satunya dilakukan dengan melakukan perbaikan di beberapa titik fasilitas seperti pengadaan dan pemasangan peralatan pendukung acara di gedung aula dan mesin asrama, serta pengadaan dan peningkatan fasilitas kamar asrama haji.

3. Sport Hall

Kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan infrastruktur sports hall Tumenggung Abdul Jamal yaitu dengan perbaikan gedung pengadaan peralatan dan mesin olahraga serta perbaikan panel listrik stadion.

4. Guest House

Pengembangan guest house BP Batam dilakukan di dua lokasi, yaitu Sekupang, Batam dan Kuningan, Jakarta, sebagai bagian dari upaya meningkatkan infrasturktur serta mendukung peningkatan penerimaan BP Batam.

Tahap pengembangan infrastruktur pada aset lainnya yaitu dengan membuat kajian bisnis (*Final Business Case* dan *Outline Business Case*) pada aset yang belum optimal seperti Gedung Beringin dan Gedung Ex-Pabrik PT. PCI.

Dari peningkatan infrastruktur dan aset di atas yang mana sebagian besar merupakan aset yang menjadi sumber penerimaan BP Batam yang didapatkan dari penyediaan layanan kepada masyarakat, maka ditargetkan akan terjadi peningkatan penerimaan BP Batam, adapun sumber penerimaan terbesar BP Batam saat ini, meliputi:

1. Layanan Pengelolaan Lahan

Dengan adanya pengembangan pulau Rempang dan Galang akan meningkatkan penerimaan BP Batam melalui penerimaan Uang Wajib Tahunan (UWT).

2. Layanan Sistem Pengelolaan Air Minum.

Adanya peningkatan fasilitas air minum berupa pembangunan instalasi pengolahan air yang menambah kapasitas produksi air bersih serta pembangunan dan peningkatan jaringan pipa yang meningkatkan volume air yang terdistribusi ke pelanggan baik industri maupun masyarakat. Selain itu, telah direncanakan pula pembangunan sumber penyediaan air bersih melalui desalinasi (SWRO) yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan air khususnya kebutuhan industri.

3. Layanan Pelabuhan Laut

Peningkatan fasilitas di terminal Batu Ampar melalui kerjasama, selain itu pengembangan terminal kabil, serta optimalisasi pelayanan pada terminal penumpang baik domestik dan internasional.

Selain penerimaan BP Batam dari sumber-sumber utama diatas, terdapat pula penerimaan dari sumber lain seperti Penerimaan Bandara, Rumah Sakit, Fasilitas dan Lingkungan, serta penerimaan pajak yang tercatat pada Biro Keuangan. Adapun rincian target penerimaan BP Batam dari layanan-layanannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Layanan	Target (Ribuan Rupiah)					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pertanahan	893.967.000	964.304.324	1.040.175.788	1.122.016.819	1.210.297.102	5.230.761.033
2	Sistem Pengelolaan Air Minum	304.583.000	575.829.847	621.136.139	670.007.131	722.723.292	2.894.279.409
3	Kepelabuhanan	401.893.000	490.154.130	528.719.458	570.319.105	615.191.812	2.606.277.505
4	Rumah Sakit	175.336.000	178.269.137	192.295.353	207.425.151	223.745.362	977.071.003
5	Kebandarudaraan	108.980.000	130.482.425	140.748.782	151.822.896	163.768.322	695.802.425
6	Keuangan	43.313.000	46.720.866	50.396.865	54.362.090	58.639.299	253.432.120
7	Fasilitas dan Lingkungan	30.768.000	36.541.304	39.416.374	42.517.655	45.862.944	195.106.277
8	Pusat Data dan TIK	9.145.000	13.494.630	14.556.388	15.701.685	16.937.094	69.834.797
9	Infrastruktur Kawasan	6.821.000	8.854.655	9.551.340	10.302.839	11.113.467	46.643.301
10	Lalu Lintas Barang	2.496.000	2.371.247	2.557.817	2.759.066	2.976.149	13.160.279
11	Aset Lainnya	796.000	925.965	998.820	1.077.408	1.162.178	4.960.371
TOTAL		1.978.098.000	2.447.948.530	2.640.553.124	2.848.311.845	3.072.417.021	12.987.328.520

Tabel 3.1 Rincian Target Penerimaan BP Batam 2025-2029

Sumber: Biro Keuangan, 2025

3.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku BP Batam dalam Pengelolaan KPBPB Batam. Kebutuhan kerangka regulasi BP Batam dalam tahun 2025-2029 harus mampu mengakomodasi proses transformasi ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien.

Adapun kerangka regulasi BP Batam tahun 2025-2029 dapat terlihat dari tabel di bawah ini, sedangkan untuk lengkapnya akan dijabarkan pada lampiran.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Pengaturan pembentukan Dewan Kawasan	Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 masa tugas Dewan Kawasan KPBPB Batam telah berakhir sejak tanggal 21 Februari 2021 dan belum ada Pembentukan Dewan Kawasan yang baru
2	Pengaturan status kelembagaan	Belum adanya pengaturan status kelembagaan BP Batam yang menegaskan BP Batam sebagai instansi K/L, sedangkan pola pengelolaan keuangan mengikuti peraturan BLU
3	Pengaturan status kepegawaian	Belum adanya pengaturan status kepegawaian BP Batam yang menjadi monostatus. Saat ini pegawai PNS di BP Batam merupakan status diperbantukan atau dipekerjakan dari berbagai kementerian/ lembaga lain, sehingga BP Batam perlu memiliki nomenklatur sendiri sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 pegawai BP Batam terdiri dari PNS dan Non PNS, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 pegawai BP Batam dapat berasal dari ASN, Non ASN dan Tenaga Profesional, sehingga perlu aturan khusus berupa Peraturan Pemerintah
4	Pengaturan sinkronisasi perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025	Adanya perizinan sesuai PP 41 Tahun 2021 yang saat ini masih dikeluarkan oleh instansi lain yaitu di bidang Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
5	Pengaturan percepatan perizinan investasi	Adanya perizinan yang masih dikeluarkan dari instansi pusat dan daerah seperti Amdal oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Izin lingkungan dan Persetujuan Bangunan dan Gedung oleh Pemerintah Kota agar menjadi kewenangan BP Batam kembali
6	Pengaturan percepatan penerbitan status HPL di Pulau Rempang dan Pulau Galang	Belum adanya pengaturan untuk percepatan penerbitan HPL Rempang dan Galang oleh Kementerian ATR/BPN sehingga berdampak pada rencana investasi pengembangan di PSN Rempang <i>Eco City</i> dan PSN Kawasan Industri Wiraraja Galang

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
7	Pengaturan Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang masuk dalam KPBPB Batam	Adanya potensi pasar transshipment sebesar 70 juta TEUs di perairan selat Philips yang dapat ditarik ke Indonesia, namun P.Tanjung Sauh dan P.Ngenang belum termasuk dalam wilayah KPBPB Batam, sehingga perlu ditetapkan sebagai bagian dari wilayah kerja KPBPB Batam dan menetakannya sebagai pelabuhan HUB Transshipment untuk wilayah Indonesia Bagian barat
8	Pengaturan keluar masuk barang kontainer khusus di Wilayah KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan khusus keluar masuk barang kontainer di wilayah KPBPB Batam antara Kementerian Keuangan Cq. Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan BP Batam
9	Pengaturan Rencana Rinci (RRP) khususnya 5 Wilayah Penataan dan Pengembangan	Belum adanya pengaturan RRP yang menjadi Kawasan Prioritas Pembangunan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 dan mempedomani Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK yang selanjutnya menjadi acuan/pedoman tata ruang di KPBPBP Batam
10	Pengaturan pengelolaan prasarana jalan di KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan pemeliharaan jalan di wilayah KPBPB Batam yang merupakan aset BP Batam, sehingga diperlukan peraturan terkait potensi PNBP terhadap penggunaan jalan melalui pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pajak Penerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Kota.
11	Pengaturan penindakan bangunan dan pemanfaatan hutan tidak berizin di wilayah kerja KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan penindakan terhadap bangunan tidak berizin dan pemanfaatan catchment area oleh Direktorat Pengamanan Aset BP Batam
12	Pengaturan alokasi tanah yang efektif sesuai perencanaan pembangunan kawasan Bareleng untuk peningkatan investasi	Belum adanya pengaturan penyelesaian 7 ribu hektar lahan menganggur dari 700 proyek yang mangkrak yang hingga saat ini masih menghambat investasi di Batam. Selanjutnya perlu regulasi terkait pembangunan pemukiman vertikal dan membatasi rumah tapak.
13	Pengaturan hubungan kerja antara BP Batam dengan Pemko Batam	Belum adanya pengaturan hubungan unit kerja antara BP Batam dengan Pemerintah Kota terkait bidang Pariwisata dan PBK, Kehutanan, Perikanan di Kawasan DAM

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi BP Batam Tahun 2025 – 2029

Sumber: Pusrenpros, 2025

3.6 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BP Batam diarahkan untuk dapat mentransformasikan kelembagaan pengelolaan dan pengembangan KPBPB Batam agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan adalah perangkat organisasi BP Batam yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka struktur kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terdiri dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau yang disingkat Badan Pengusahaan.

Tugas-tugas Badan Pengusahaan Batam telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, yaitu; melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Kawasan Batam). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 telah ditetapkan bahwa Kepala BP Batam dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam dan Wakil Kepala BP Batam dijabat *ex-officio* oleh Wakil Wali Kota Batam. Selanjutnya, penetapan organisasi baru di tetapkan dengan keluarnya Peraturan Dewan Kawasan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terdiri dari:

1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Anggota/ Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan;
4. Anggota/ Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan;
5. Anggota/ Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi;
6. Anggota/ Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan;
7. Anggota/ Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan & Lalu Lintas Barang;
8. Anggota/ Deputi Bidang Pelayanan Umum; dan
9. Anggota/ Deputi Bidang Infrastruktur.

Gambar 3.27. Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam

Sumber: BP Batam, 2025



BP Batam adalah lembaga pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) diawasi oleh Dewan Pengawas yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas, penasihat dan pengarah agar organisasi berjalan dengan benar. Kewajiban Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan BP Batam dan Anggota/Deputi BP Batam mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Kepala BP Batam;
2. Melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BP Batam dan penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan paling sedikit dua kali dalam satu tahun; dan
4. Menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

Lebih lanjut, guna menjawab tantangan yang akan datang di mana memerlukan kecepatan, keakuratan dan efektivitas tinggi, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan kelembagaan, yaitu:

1. Menetapkan BP Batam menjadi instansi pemerintah non-struktural agar jenjang karir sumber daya manusia di lingkungan BP Batam yang berstatus PNS dapat diatur secara spesifik; dan
2. Penetapan BP Batam menjadi monostatus untuk memberikan kejelasan terkait status pegawai tetap yang berada di BP Batam.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan lingkungan, akan dilakukan dalam restrukturisasi kelembagaan di BP Batam di antaranya:

1. Menyusun struktur organisasi yang ringkas dan efektif sesuai dengan fungsi sehingga pelaksanaan pengelolaan di BP Batam berjalan efisien;
2. Membangun tata kelola yang transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*;
3. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM BP Batam dan menjalankan reformasi birokrasi;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pada layanan yang ada di BP Batam guna peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders*; dan
5. Penerapan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025.

Data Bulan Oktober 2024, menyebutkan Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam dengan jumlah total 2.192 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 1.361 orang dan Pegawai Non PNS sejumlah 1.887 orang. Di samping itu selain tenaga PNS dan Non PNS terdapat juga tenaga kontrak BP Batam yang kini berjumlah 305 orang.

Rincian komposisi SDM BP Batam menurut status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

STATUS	JUMLAH
I. PIMPINAN	
PNS	2
NON PNS	4
POLRI	0
TNI	0
SUBTOTAL	6
II. PEGAWAI TETAP PNS/POLRI	
PNS PENUGASAN	1.359
POLRI	2
SUBTOTAL	1.361
III. PEGAWAI TETAP NON PNS	
NON PNS	520
CAPEG NON	0
SUBTOTAL	520
JUMLAH PEGAWAI TETAP	1.887
IV. PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P2K)	
STRUKTURAL	0
P2K PELAKSANA	290
STAF KHUSUS	7
TENAGA AHLI	8
SUBTOTAL	305
GRAND TOTAL	2.192

Tabel 3.3 Sumber Daya Manusia BP Batam

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia BP Batam, 2024

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

WTP 230 L/D

Target Kinerja	83
Pelaksana Kinerja Program Pengembangan Kawasan Strategis	88
Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen	93
Kerangka Pendanaan	95
Kerangka Pendanaan Sumber PNB	95
Kerangka Pendanaan Sumber Non-APBN	97
Kerangka Pendanaan Program BP Batam	99
Kerangka Pendanaan Program Pengembangan Kawasan Strategis	99
Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen	100

4.1 Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan tahun 2025-2029 telah dirumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis. Keterkaitan ketiga Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: “KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial” telah dirumuskan Sasaran Strategis: 1) Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam, dan 2) Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2: “Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel” telah dirumuskan Sasaran Strategis yaitu terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis BP Batam tersebut diukur melalui capaian target kinerja atau indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Tabel berikut menjelaskan target kinerja dan indikator kinerja sasaran strategis pada setiap sasaran strategis:

Target Kinerja Sasaran Strategis BP Batam 2025-2029

Tujuan BP Batam	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1. KPBPB Batam menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.	1. Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	1. Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1. Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	Triliun Rupiah	46,29	52,31	59,56	68,23	78,56
		2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	2. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan umum dan kawasan	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
			3. Nilai realisasi PNBP BP Batam	Triliun Rupiah	1,99	2,44	2,64	2,84	3,07
2. Meningkatnya tata kelola kelembagaan BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel.	2. Indeks Reformasi Birokrasi	3. Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	4. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA

Tabel 4.1. Target Kinerja BP Batam 2025 – 2029

Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)

Target Indikator Kinerja Program BP Batam 2025-2029

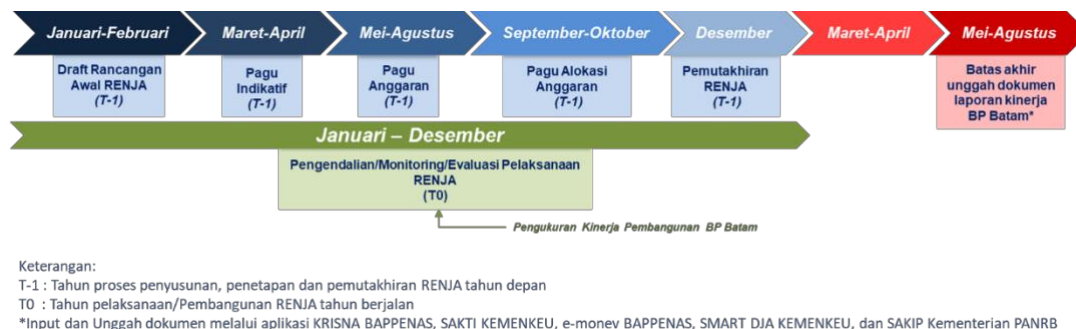
Nomenklatur Program		Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	SP 1	Meningkatnya efektivitas promosi dan kualitas realisasi investasi	IKP 1	Jumlah minat investasi	Minat	200	250	300	350	400
				IKP 2	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	46,29	52,31	59,56	68,23	78,56
		SP 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam	IKP 3	Luas lahan, pesisir, dan reklamasi yang dialokasikan untuk investasi	Hektar	800	800	800	800	800
				IKP 4	Persentase keberhasilan pengawasan dan pengendalian lahan, pesisir, dan reklamasi	Persen	70	75	80	85	90
		SP 3	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur	IKP 5	Persentase pembangunan infrastruktur pendukung investasi	Persen	100	100	100	100	100
				IKP 6	Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, aset, dan objek vital	Persen	100	100	100	100	100
		SP 4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam	IKP 7	Rata-rata IKM pengguna layanan BU	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
				IKP 8	Realisasi PNBPU BU	Miliar Rupiah	510,89	790,62	852,83	919,93	992,32
		SP 5	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang	IKP 9	Rata-rata IKM pengguna layanan bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
				IKP 10	Realisasi PNBPU kawasan bandara dan pelabuhan	Miliar Rupiah	561,45	620,63	669,45	722,13	778,95

Nomenklatur Program		Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
WA	Program Dukungan Manajemen	SP 6	Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam	IKP 11	Indeks perencanaan pembangunan	Indeks	94,5	94,7	95	95,3	95,5
				IKP 12	Indeks kualitas kebijakan	Indeks	75	80	85	87	90
				IKP 13	Tingkat kematangan SPBE	Indeks	3,9	4,1	4,2	4,4	4,5
				IKP 14	IKM pengguna layanan PTSP	Indeks	87,5	88	88,5	89	90
		SP 7	Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam	IKP 15	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA
				IKP 16	Indeks sistem merit	Indeks	275	285	290	295	300
				IKP 17	Indeks maturitas SPIP	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
				IKP 18	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 4.2. Target Indikator Kinerja Program BP Batam 2025 – 2029

Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)

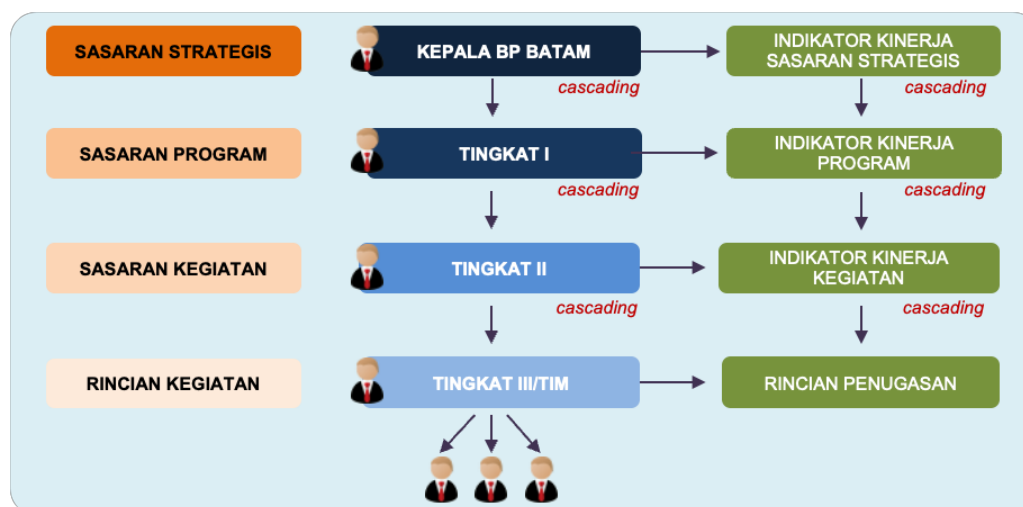
Dalam memastikan IKSS BP Batam dapat tercapai setiap tahunnya, maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.



Gambar 4.1. Waktu Pengukuran Kinerja

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja sasaran strategis (*cascading* IKSS) level lembaga BP Batam. Penurunan/Pemetaan indikator kinerja sasaran strategis (*cascading* IKSS) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses *cascading* IKSS berdasarkan *logic* model penurunan kinerja organisasi:



Gambar 4.2. Alur Proses Cascading

Sumber: BP Batam, 2024

Berdasarkan alur proses *cascading* IKSS tersebut penugasan setiap individu disusun berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Penugasan individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan tetap memperhatikan ketercapaian indikator kinerjanya.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam *cascading* IKSS BP Batam yaitu:

1. Menurunkan (*cascading*) indikator kinerja level lembaga sampai dengan indikator kinerja level eselon II/tingkat 2;
2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja eselon II/tingkat 2;
3. Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan; dan
4. Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas untuk masing-masing individu.

Data dukung yang digunakan untuk menyusun pemetaan indikator kinerja sampai penugasan individu antara lain dokumen perjanjian kinerja Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II serta Tabel Informasi Kinerja dan Anggaran (yang disampaikan pada saat pengusulan Renja K/L).

4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Pengembangan Kawasan Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis BP Batam, yaitu: (SS-1) Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam, dan (SS-2) Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Pengembangan Kawasan Strategis.

Pelaksana kinerja Program Pengembangan Kawasan Strategis difokuskan untuk melaksanakan tugas utama BP Batam dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB Batam. Anggota/Deputi yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Anggota/Deputi Bidang Investasi Dan Pengusahaan;
2. Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi;
3. Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur;
4. Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum; dan

5. Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang.

Program Pengembangan Kawasan Strategis tersebut mempunyai 5 (lima) sasaran program yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas promosi dan kualitas realisasi investasi;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam;
3. Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam; dan
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang.

Selanjutnya Sasaran Program pada Program Pengembangan Kawasan Strategis akan menghasilkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program, yaitu:

1. Jumlah minat investasi;
2. Nilai realisasi investasi;
3. Luas lahan, pesisir, dan reklamasi yang dialokasikan untuk investasi;
4. Persentase keberhasilan pengawasan dan pengendalian lahan, pesisir, dan reklamasi;
5. Persentase pembangunan infrastruktur pendukung investasi;
6. Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, aset, dan objek vital;
7. Rata rata IKM pengguna layanan BU;
8. Realisasi PNBP BU;
9. Rata-rata IKM pengguna layanan bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang; dan
10. Realisasi PNBP kawasan bandara dan pelabuhan.

Adapun pencapaian kelima sasaran program tersebut akan dilaksanakan oleh 14 (empat belas) kegiatan yang akan dikerjakan pada Program Pengembangan Kawasan Strategis, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi;
2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK;

3. Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama;
4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PBPB Batam;
5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
6. Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
7. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur;
8. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur;
9. Penyelenggaraan Pengamanan Aset dan Kawasan.
10. Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan;
11. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit;
12. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara;
13. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan; dan
14. Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang.

Dari 14 (empat belas) kegiatan tersebut diturunkan dari Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang dapat dilihat pada tabel pemetaan berikut:

Pemetaan Kegiatan BP Batam pada Program Pengembangan Kawasan Strategis

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
SS-1 Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	SP-1 Meningkatnya efektifitas promosi dan kualitas realisasi investasi	IKP-1 Jumlah minat investasi	1. Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi;
		IKP-2 Nilai realisasi investasi	2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK; 3. Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama;
	SP-2 Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam	IKP-3 Luas lahan, pesisir, dan reklamasi yang dialokasikan untuk investasi	4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PBPB Batam; 5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
		IKP-4 Persentase keberhasilan pengawasan dan pengendalian lahan, pesisir, dan reklamasi	6. Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
	SP-3 Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur	IKP-5 Persentase pembangunan infrastruktur pendukung investasi	7. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur; 8. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur;
		IKP-6 Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, aset, dan objek vital	9. Penyelenggaraan Pengamanan Aset dan Kawasan.

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
SS-2 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	SP-4 Meningkatkan kualitas pelayanan umum BP Batam	IKP-7 Rata-rata IKM pengguna layanan BU	10. Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan; 11. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit;
		IKP-8 Realisasi PNBPU BU	12. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara; 13. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan; 14. Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang;
	SP-5 Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang	IKP-9 Rata-rata IKM pengguna layanan Bandara, pelabuhan, dan lalu lintas barang	15. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara; 16. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan; dan 17. Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang;
		IKP-10 Realisasi PNBPU Kawasan Bandara dan Pelabuhan	

Tabel 4.3. Pemetaan Kegiatan BP Batam pada Program Pengembangan Kawasan Strategis

Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)

4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis BP Batam yaitu: SS-3. Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel akan dicapai melalui Program Dukungan Manajemen yang difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi 1. Tata kelola organisasi; 2. Sumber daya manusia; 3. Pengelolaan keuangan; 4. Perencanaan; 5. Pengendalian; 6. Layanan internal; dan 7. Barang milik negara.

Anggota/Deputi yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan; dan
2. Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam; dan
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam.

Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen akan diukur melalui 8 (delapan) buah Indikator Kinerja Program, yaitu:

1. Indeks perencanaan pembangunan;
2. Indeks kualitas kebijakan;
3. Tingkat kematangan SPBE;
4. IKM pengguna layanan PTSP;
5. Indeks reformasi birokrasi;
6. Indeks sistem merit;
7. Indeks maturitas SPIP; dan
8. Opini BPK.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut akan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dikerjakan pada Program Dukungan Manajemen, yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan Program Strategis;
2. Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis;
3. Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja;
6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
7. Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum;
8. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan;
9. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran; dan
10. Pengelolaan dan Pelayanan Umum.

Dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut diturunkan dari sasaran strategis dan sasaran program yang dapat dilihat pada tabel pemetaan berikut:

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
SS-3 Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	SP-6 Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam	IKP-11 Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Penyusunan Perencanaan Program Strategis
		IKP-12 Indeks kualitas kebijakan	2. Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis
		IKP-13 Tingkat Kematangan SPBE	3. Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi
		IKP-14 IKM pengguna layanan PTSP	4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	SP-7 Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam	IKP-15 Indeks Reformasi Birokrasi	5. Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja
		IKP-16 Indeks Sistem Merit	6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
		IKP-17 Indeks maturitas SPIP	7. Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum
			8. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan
		IKP-18 Opini BPK	9. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran
			10. Pengelolaan dan Pelayanan Umum

Tabel 4.4. Pemetaan Kegiatan BP Batam pada Program Dukungan Manajemen

Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)

4.2. Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan BP Batam yang merupakan bagian dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) utamanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa layanan yang diberikan oleh BP Batam kepada masyarakat, serta dapat berasal dari sumber pendanaan Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berasal dari pemerintah pusat.

Selain sumber pendanaan tersebut, BP Batam juga mengupayakan sumber pendanaan Non-APBN atau sumber pendanaan lain yang dapat berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja sama Operasi (KSO) dan Kerja sama Pemanfaatan aset (KSP).

4.2.1. Kerangka Pendanaan sumber PNBP

Pendanaan utama yang diterima oleh BP Batam yaitu PNBP yang berasal dari pendapatan layanan yang diberikan BP Batam kepada masyarakat dan investor yaitu:

1. Layanan Pengelolaan Pertanahan;
2. Layanan Pelabuhan Laut;
3. Layanan Bandar Udara;
4. Layanan Air Bersih;
5. Layanan Rumah Sakit;
6. Layanan Fasilitas Lingkungan;
7. Layanan Infrastruktur Kawasan;
8. Layanan Lalu Lintas dan Penanaman Modal;
9. Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
10. Layanan Keuangan; dan
11. Layanan Lainnya.

Selain sumber pendanaan utama dari PNBP tersebut, sumber pendanaan dari Rupiah Murni dan PHLN merupakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dalam rangka pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung investasi di KPBPB Batam.

Target Kinerja dan Pendanaan BP Batam Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja					Program	Alokasi Anggaran (Rp Ribu)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
										1.992.728.199	2.447.948.530	2.640.553.124	2.848.311.845	3.072.417.021
1	Meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam	1 Nilai realisasi Investasi di KPBPB Batam	Triliun Rupiah	46,29	52,31	59,56	68,23	78,56*	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.086.213.919	1.348.920.479	1.455.053.544	1.569.537.158	1.693.028.342
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kawasan dan Pelayanan Umum BP Batam	2 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan umum dan kawasan	Indeks	87,5	88	88,5	89	90						
		3 Nilai realisasi PNBPN BP Batam	Triliun Rupiah	1,99	2,44	2,64	2,84	3,07**						
3	Terwujudnya pengelolaan organisasi BP Batam yang efektif, efisien, dan akuntabel	4 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA	Program Dukungan Manajemen	906.514.280	1.099.028.051	1.185.499.580	1.278.774.687	1.379.388.679

* Publikasi Kepala BP Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 9 Juli 2025

** TRPNBP 2026

Tabel 4.5. Target Kinerja dan Pendanaan BP Batam 2025-2029

Sumber: BP Batam, 2025 (diolah)

4.2.2. Kerangka Pendanaan sumber Non-APBN

Sumber pendanaan yang berasal dari non-APBN dapat berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pola Kerja sama Operasi (KSO) atau Kerja sama Pemanfaatan aset (KSP), selain itu bentuk kerja sama ini juga memberikan manfaat bagi BP Batam berupa tambahan penerimaan dari bagi hasil. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan anggaran yang dialokasikan BP Batam untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan aset. Mekanisme kerja sama diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan aset yang selama ini belum maksimal atau belum termanfaatkan.

1. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Salah satu tugas dan fungsi BP Batam adalah membangun dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, BP Batam mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Adapun BP Batam telah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim dengan Konsorsium PT. Bandara Internasional Batam (BIB) pada tahun 2021. Pengembangan Bandar Udara Hang Nadim dilakukan untuk menjawab tantangan ke depan dan mengambil peluang dari meningkatnya potensi jumlah penumpang pesawat udara dan kargo logistik, pengembangan ini juga dilakukan dalam rangka mendukung KPBPB Batam sebagai kawasan hub logistik dan mendukung KPBPB Batam sebagai destinasi pariwisata melalui pembukaan rute penerbangan internasional dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Lingkup pengelolaan dan pengembangan Bandara Hang Nadim meliputi peningkatan fasilitas terminal 1 penumpang yang telah dimulai pada periode sebelumnya dan akan dilanjutkan pada periode kali ini serta rencana pembangunan Bandara Hang Nadim terminal 2 penumpang dalam jangka menengah-panjang untuk memberikan layanan untuk 30 juta penumpang per tahun, serta pembangunan 237 air *traffic* movement (ATM), dan volume kargo 190.000 MT hingga tahun 2045.

2. Kerja sama Operasional (KSO)

KSO adalah pendayagunaan Aset BLU dan/ atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Sebagai pengelola dan pengembang kawasan, BP Batam memiliki aset-aset yang mendukung iklim investasi di KPBPB Batam. Untuk mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan aset tersebut, salah satu skema yang akan diterapkan adalah skema KSO.

Adapun rencana optimalisasi pengelolaan aset BP Batam yang dilakukan dengan skema KSO sebagai berikut:

- a. KSO Pelabuhan Barang dan Penumpang; dan
- b. KSO Pengelolaan air bersih dan limbah.

3. Kerja sama Pemanfaatan Aset

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) merupakan bentuk pemanfaatan aset yang diharapkan menjadi suatu manajemen pengelolaan aset yang baik guna memaksimalkan potensi aset yang ada di BP Batam. Pendekatan kerja sama pemanfaatan aset dilakukan dengan pertimbangan saling menguntungkan. Kerja sama tersebut tidak hanya sebatas aset fisik bangunan melainkan penyiapan kawasan yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada tahun 2023 sampai 2024 sudah dilakukan Kerja sama Pemanfaatan Aset Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur (KSP DRPI) untuk Pelabuhan Terminal Peti Kemas Batu Ampar dan Pelabuhan Ferry Internasional Batam

Center, sedangkan rencana kerja sama pemanfaatan aset yang akan dilakukan dengan skema KSP pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Fasilitas Kawasan Olahraga dan Rumah Susun Pekerja; dan
- b. Pengelolaan Kawasan Waduk untuk PLTS.

4.3. Kerangka Pendanaan Program BP Batam

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengelola kawasan dan badan layanan Umum serta upaya pencapaian target kinerja tahun 2025-2029 BP Batam merumuskan kerangka pendanaan untuk mendanai 2 program yaitu: 1) Program Pengembangan Kawasan Strategis, dan 2) Program Dukungan Manajemen.

4.3.1. Kerangka Pendanaan Program Pengembangan Kawasan Strategis

Pendanaan untuk Pengembangan Kawasan Strategis digunakan untuk menyelenggarakan fungsi utama kelembagaan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi;
2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK;
3. Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama;
4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PBPB Batam;
5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
6. Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam;
7. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur;
8. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur;
9. Penyelenggaraan Pengamanan Aset dan Kawasan;
10. Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan;
11. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit;
12. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara;
13. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan; dan
14. Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang.

4.3.2. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen

Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan Program Strategis;
2. Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis;
3. Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja;
6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
7. Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum;
8. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan;
9. Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran; dan
10. Pengelolaan dan Pelayanan Umum.

BAB 5

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) BP Batam 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dalam pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan KPBPB Batam untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka di dalam Renstra BP Batam dirumuskan visi BP Batam yaitu **“Kawasan ekonomi yang maju dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

Renstra ini menjabarkan visi dan misi BP Batam sampai ke tahapan pelaksanaan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan setiap unit kerja selama 5 tahun untuk mendukung sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan BP Batam, serta menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra BP Batam 2025-2029, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk target indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BP Batam sebagaimana tertuang dalam visi BP Batam.

Dalam rangka pencapaian hasil terbaik diperlukan komitmen dari berbagai pihak terkait sehingga tercipta sinergitas demi tercapainya target capaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhirnya Renstra BP Batam 2025-2029 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi KPBPB Batam serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.



LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029	107
Matriks Kegiatan Infrastruktur Prioritas BP Batam Tahun 2025-2029	112
Matriks Kerangka Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029	114

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
112	Badan Pengusahaan Batam									1.992.728.199	2.447.948.530	2.640.553.124	2.848.311.845	3.072.417.021	
EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis									1.086.213.919	1.348.920.479	1.455.053.544	1.569.537.158	1.693.028.342	
A3	Anggota Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir Dan Reklamasi									73.319.509	91.052.210	98.216.198	105.943.847	114.279.510	
5123	Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PBPB Batam									39.466.964	49.012.249	52.868.534	57.028.229	61.515.212	Direktorat Pengelolaan Lahan
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan PBPB Batam	01- Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Lahan di Batam	Persentase perizinan lahan yang selesai tepat waktu (sesuai Perka BP Batam No.11 Tahun 2023)	Persen	100	100	100	100	100	39.466.964	49.012.249	52.868.534	57.028.229	61.515.212	
			Luas lahan yang dialokasikan	Hektar	500	500	500	500	500						
			Persentase penyelesaian permasalahan lahan	Persen	70	75	80	85	90						
8000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam									16.162.452	20.071.426	21.650.645	23.354.120	25.191.622	Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Reklamasi
2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam	01- Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pesisir dan Reklamasi di Batam	Persentase perizinan pesisir dan reklamasi yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	16.162.452	20.071.426	21.650.645	23.354.120	25.191.622	
			Luas kawasan pesisir dan reklamasi yang dialokasikan	Hektar	300	300	300	300	300						
			Persentase penyelesaian permasalahan pesisir dan reklamasi	Persen	70	75	80	85	90						
8001	Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam									17.690.093	21.968.535	23.697.019	25.561.498	27.572.676	Direktorat Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi
3	Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Kawasan PBPB Batam	01- Meningkatnya Akuntabilitas Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi di Batam	Persentase keberhasilan pengawasan kewajiban pemanfaatan dan pembangunan lahan, pesisir, dan reklamasi	Persen	70	75	80	85	90	17.690.093	21.968.535	23.697.019	25.561.498	27.572.676	
			Persentase keberhasilan tindakan evaluasi dan pembatalan alokasi lahan, pesisir, dan reklamasi	Persen	70	75	80	85	90						
			Persentase pelaksanaan kegiatan dokumentasi lahan, pesisir, dan reklamasi	Persen	100	100	100	100	100						
A4	Anggota Bidang Investasi Dan Pengusahaan									25.768.130	32.000.289	34.518.072	37.233.953	40.163.515	
5982	Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama									3.224.227	4.004.024	4.319.061	4.658.884	5.025.445	Direktorat Pengendalian Pengusahaan
4	Pengendalian Pengusahaan dan Kerjasama	01- Meningkatnya kualitas pengendalian pengusahaan dan kerjasama badan usaha di BP Batam	Persentase hasil evaluasi pengendalian, dan pembinaan badan usaha yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	3.224.227	4.004.024	4.319.061	4.658.884	5.025.445	
			Persentase hasil perbaikan, dan perubahan kerjasama usaha yang ditindaklanjuti.	Persen	100	100	100	100	100						
6652	Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi									15.393.268	19.116.211	20.620.274	22.242.676	23.992.727	Direktorat Investasi
5	Penyelenggaraan Pelayanan Investasi dan Promosi	01- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal di KPBPB Batam	Nilai realisasi investasi di KPBPB Batam	Rp Triliun	46,29	52,31	59,56	68,23	78,56*	15.393.268	19.116.211	20.620.274	22.242.676	23.992.727	
		02- Terlaksananya kegiatan promosi dalam maupun luar negeri	Jumlah minat investasi dari kunjungan dan pameran dalam dan luar negeri	Minat-Investasi	200	250	300	350	400						
8005	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK									7.150.635	8.880.054	9.578.737	10.332.393	11.145.343	Direktorat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK
6	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PBPB dan KEK	01- Tersedianya dokumen kajian pengembangan pengembangan, kerjasama, daya saing, dan	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan, kerjasama, dan peningkatan daya saing KPBPB yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	7.150.635	8.880.054	9.578.737	10.332.393	11.145.343	
			Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan KEK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100						

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
112	Badan Pengusahaan Batam									1.992.728.199	2.447.948.530	2.640.553.124	2.848.311.845	3.072.417.021	
EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis									1.086.213.919	1.348.920.479	1.455.053.544	1.569.537.158	1.693.028.342	
A5	Anggota Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan Dan Lalu Lintas Barang									70.521.131	87.577.040	94.467.600	101.900.312	109.917.828	
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan									55.689.445	69.158.231	74.599.599	80.469.099	86.800.406	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
7	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kepelabuhanan	01- Terwujudnya Kinerja kepelabuhanan yang sehat	Realisasi PNPB kepelabuhanan	Rp Miliar	445,13	490,15	528,71	570,31	615,19	55.689.445	69.158.231	74.599.599	80.469.099	86.800.406	
			Indeks kepuasan masyarakat layanan kepelabuhanan	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90						
			Jumlah pelayanan bongkar muat terminal kargo Batu Ampar	Ton	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000						
			Jumlah pelayanan bongkar muat terminal peti kemas Batu Ampar	Teus	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000						
			Jumlah pelayanan bongkar muat terminal curah cair Kabil	Ton	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000						
Jumlah penumpang pelabuhan domestik dan internasional	orang	8.500.000	8.750.000	9.000.000	9.250.000	9.750.000									
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara									13.045.934	16.201.163	17.475.871	18.850.872	20.334.058	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
8	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Bandara	01- Terwujudnya pengelolaan kawasan bandara yang optimal	Realisasi PNPB kawasan bandara	Rp Miliar	116,32	130,48	140,74	151,82	163,76	13.045.934	16.201.163	17.475.871	18.850.872	20.334.058	
			Indeks kepuasan masyarakat layanan kawasan bandara	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90						
5129	Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang									1.785.752	2.217.646	2.392.130	2.580.341	2.783.364	Direktorat Lalu Lintas Barang
9	Penyelenggaraan Pelayanan Lalu lintas Barang	01- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lalu Lintas Barang di KPBPB Batam	Persentase pelayanan lalu lintas barang perdagangan yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	1.785.752	2.217.646	2.392.130	2.580.341	2.783.364	
			Persentase pelayanan lalu lintas barang industri yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100						
A6	Anggota Bidang Pelayanan Umum									203.664.434	252.921.752	272.821.637	294.287.247	317.441.766	
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit									133.403.590	165.667.952	178.702.707	192.763.036	207.929.631	Badan Usaha Rumah Sakit
10	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rumah Sakit	01- Terwujudnya Kinerja Rumah Sakit BP Batam yang sehat	Realisasi PNPB rumah sakit *PNBP harus mengikuti perhitungan keuangan	Rp Miliar	175,33	178,26	192,29	207,42	223,74	133.403.590	165.667.952	178.702.707	192.763.036	207.929.631	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BURS	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90						
			Rasio penerimaan terhadap pengeluaran	Rasio	0,6	0,7	0,8	0,9	1						
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan									70.260.844	87.253.800	94.118.930	101.524.211	109.512.135	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan
11	Pengelolaan dan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	01- Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Aset - Aset BP Batam yang Profesional dan Akuntabel	Realisasi PNPB pengelolaan air minum	Rp Miliar	304,00	575,82	621,13	670,00	722,72	70.260.844	87.253.800	94.118.930	101.524.211	109.512.135	
			Realisasi PNPB pengelolaan lingkungan	Rp Miliar	31,56	36,54	39,41	42,51	45,86						
			Indeks kepuasan masyarakat layanan air minum dan lingkungan	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90						
			Rasio penerimaan terhadap pengeluaran	Rasio	1	1	1	1	1.1						

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
112	Badan Pengusahaan Batam									1.992.728.199	2.447.948.530	2.640.553.124	2.848.311.845	3.072.417.021	
EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis									1.086.213.919	1.348.920.479	1.455.053.544	1.569.537.158	1.693.028.342	
A7	Anggota Bidang Infrastruktur									712.940.715	885.369.188	955.030.037	1.030.171.799	1.111.225.723	
5127	Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur									644.034.926	799.798.171	862.726.293	930.605.598	1.003.825.653	Direktorat Pembangunan Infrastruktur Kawasan
12	Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur	01- Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Prasarana dan Sarana	Jumlah fasilitas jalan yang ditingkatkan	Km	13,80	15,74	9,80	10	15	644.034.926	799.798.171	862.726.293	930.605.598	1.003.825.653	
			Jumlah fasilitas pelabuhan yang ditingkatkan	Unit	0	4	3	1	0						
			Jumlah fasilitas bandar udara yang ditingkatkan	Unit	0	0	0	1	0						
			Jumlah fasilitas rumah sakit yang ditingkatkan	Unit	0	2	3	0	0						
			Jumlah fasilitas air baku dan air bersih yang ditingkatkan	Unit	0	9	8	2	1						
			Jumlah fasilitas air limbah dan lingkungan hidup yang ditingkatkan	Unit	0	2	3	0	0						
	Jumlah fasilitas pengembangan kawasan dan pariwisata yang ditingkatkan	Unit	350	9	0	0	0	0							
6651	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur									7.686.895	9.546.011	10.297.091	11.107.265	11.981.185	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
13	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur	01- Terwujudnya dokumen perencanaan teknis yang berkualitas	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan teknis bangunan oleh unit/instansi lain	Persen	100	100	100	100	7.686.895	9.546.011	10.297.091	11.107.265	11.981.185		
			Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan teknis perhubungan oleh unit/instansi lain	Persen	100	100	100	100						100	
			Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan teknis lingkungan oleh unit/instansi lain	Persen	100	100	100	100						100	
5134	Penyelenggaraan Pengamanan Aset dan Kawasan									61.218.894	76.025.006	82.006.653	88.458.936	95.418.885	Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan
14	Penyelenggaraan Pengamanan Aset dan Kawasan	01- Terwujudnya Pengamanan yang Efektif Terhadap Aset-Aset BP Batam	Persentase keberhasilan pengamanan lingkungan, hutan, aset, dan objek vital	Persen	100	100	100	100	100	61.218.894	76.025.006	82.006.653	88.458.936	95.418.885	
			Persentase keberhasilan penertiban bangunan liar	Persen	100	100	100	100	100						

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
112	Badan Pengusahaan Batam									1.992.728.199	2.447.948.530	2.640.553.124	2.848.311.845	3.072.417.021	
WA	Program Dukungan Manajemen									906.514.280	1.099.028.051	1.185.499.580	1.278.774.687	1.379.388.679	
A1	Anggota Bidang Administrasi Dan Keuangan									804.011.088	932.114.193	1.005.452.940	1.084.561.978	1.169.895.309	
5114	Pengelolaan dan Pelayanan Umum									149.691.602	183.887.265	198.355.513	213.962.127	230.796.665	Biro Umum
15	Pengelolaan dan Pelayanan Umum	01- Terpenuhinya Kebutuhan Kerumahtangaan, Kesekretariatan, Pengadaan, Humas dan Protokol yang efektif dan efisien	Tingkat digitalisasi arsip	Indeks (Skala 1-100)	80	81	81	82	82	149.691.602	183.887.265	198.355.513	213.962.127	230.796.665	
			Indeks tata kelola pengadaan	Indeks (Skala 1-100)	88	89	89	89	90						
			Indeks pengelolaan aset	Indeks	3.6	3.7	3.8	3.9	4						
			Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks (Skala 1-100)	90	90	91	91	91						
			Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan tamu	Persen	100	100	100	100	100						
5115	Pengelolaan Sumber Daya Manusia									631.818.804	725.136.380	782.190.114	843.732.832	910.117.729	Biro Sumber Daya Manusia
16	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	01- Terkelolanya Kepegawaian BP Batam Secara Profesional	Indeks sistem merit	Indeks	280	285	290	300	325	631.818.804	725.136.380	782.190.114	843.732.832	910.117.729	
			Persentase pegawai yang mengikuti program pengembangan kompetensi	Persen	5	5	6	6	6						
5116	Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran									6.471.418	6.447.612	6.954.911	7.502.123	8.092.390	Biro Keuangan
17	Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran	01- Tersedianya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran	indeks	93	94	94	95	95	6.471.418	6.447.612	6.954.911	7.502.123	8.092.390	
			Persentase layanan perbendaharaan yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100						
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum									8.703.139	7.372.260	7.952.311	8.578.000	9.252.916	Biro Hukum
18	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	01- Tersedianya Regulasi dan layanan hukum yang Mendukung Kinerja BP Batam	Persentase pemberian pelayanan hukum dan penanganan perkara yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi	Persen	100	100	100	100	100	8.703.139	7.372.260	7.952.311	8.578.000	9.252.916	
			Persentase penyelesaian penyusunan peraturan dan perikatan	Persen	100	100	100	100	100						
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan									3.226.766	3.963.891	4.275.769	4.612.187	4.975.074	Satuan Pemeriksa Intern
19	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	01- Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur dan Lembaga BP Batam	Tindak lanjut rekomendasi BPK	Nilai	95	95	95	95	95	3.226.766	3.963.891	4.275.769	4.612.187	4.975.074	
			Indeks Kapabilitas APIP	Indeks	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40						
7999	Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja									4.099.359	5.306.785	5.724.322	6.174.709	6.660.535	Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
20	Pengelolaan Organisasi, Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja	01- Terwujudnya tata kelola organisasi, kepatuhan, kinerja dan manajemen resiko yang profesional	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	BB	BB	A	A	AA	4.099.359	5.306.785	5.724.322	6.174.709	6.660.535	
			Nilai manajemen risiko	Indeks (Skala 1-5)	3	3	2	2	2						
			Indeks pelayanan publik	Indeks (Skala 0-5)	4,01	4,02	4,03	4,04	4,05						
			Nilai SAKIP	Indeks (Skala 1-100)	61	62	63	64	65						

No/ Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (Tahun)					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Kerja Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
112	Badan Pengusahaan Batam									1.992.728.199	2.447.948.530	2.640.553.124	2.848.311.845	3.072.417.021	
WA	Program Dukungan Manajemen									906.514.280	1.099.028.051	1.185.499.580	1.278.774.687	1.379.388.679	
A2	Anggota Bidang Kebijakan Strategis									102.503.192	166.913.858	180.046.640	194.212.709	209.493.370	
5113	Penyusunan Perencanaan Program Strategis									37.370.018	45.906.849	49.518.796	53.414.935	57.617.635	Pusat Perencanaan Program Strategis
21	Penyusunan Perencanaan Program Strategis	01- Tersedianya dokumen perencanaan strategis dan kajian kelayakan yang berkualitas	Indeks perencanaan pembangunan	Indeks	94,5	94,7	95	95,3	95,5	37.370.018	45.906.849	49.518.796	53.414.935	57.617.635	
			Persentase pemanfaatan dokumen kajian kawasan dan tata bangunan oleh unit/instansi lain	Persen	100	100	100	100	100						
			Persentase pemanfaatan dokumen kajian SDA dan lingkungan oleh unit/instansi lain	Persen	100	100	100	100	100						
			Persentase pemanfaatan dokumen kajian kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan konektivitas darat oleh unit/instansi lain	Persen	100	100	100	100	100						
5978	Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis								8.020.279	10.340.578	11.154.175	12.031.786	12.978.450	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	
22	Penyusunan Harmonisasi Kebijakan dan Pelayanan Dukungan Strategis	01- Terwujudnya harmonisasi i kebijakan organisasi dan dukungan strategis	Indeks kualitas kebijakan	Indeks (Skala 1-100)	75	80	85	87	90	8.020.279	10.340.578	11.154.175	12.031.786		12.978.450
			Indeks reformasi hukum	Indeks	AA	AA	AA	AA	AA						
			Persentase kebijakan strategis pimpinan yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	90	95	95						
			Persentase rekomendasi tarif yang dimanfaatkan	Persen	80	80	80	85	90						
6671	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								12.509.324	22.976.757	24.784.568	26.734.618	28.838.098	Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
23	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	01- Meningkatnya Kecepatan dan Akuntabilitas Pelayanan Investasi di KPBPB Batam	Indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan investasi	Indeks (Skala 1-100)	87,5	88	88,5	89	90	12.509.324	22.976.757	24.784.568	26.734.618		28.838.098
			Persentase penyelesaian perizinan sesuai kewenangan BP Batam yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100						
			Tingkat implementasi kebijakan transformasi digital MPP	Persen	60	60	65	65	65						
6673	Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi								44.603.571	87.689.674	94.589.101	102.031.370	110.059.187	Pusat Data dan Sistem Informasi	
24	Pengelolaan Data Center dan Teknologi Informasi	01- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi di BP Batam	Tingkat kematangan SPBE	Indeks (Skala 0-5)	3,9	4,1	4,2	4,4	4,5	44.603.571	87.689.674	94.589.101	102.031.370		110.059.187
			Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE	Indeks (Skala 0-5)	3,2	3,5	3,7	4	4,1						
			Indeks pembangunan statistik	Indeks (Skala 0-5)	2,8	3	3,3	3,6	3,8						

Lampiran 2 (a)
Matriks Kegiatan Infrastruktur Prioritas BP Batam Pendanaan APBN dan Non-APBN Tahun 2025-2029
(Usulan RPJMN 2025-2029)

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Indikator	Penugasan Indikator	Target Total	Target (Tahun)					Alokasi APBN (Rp Juta)											Total APBN (Rp Juta)	
									PNBP					Total PNBP (Rp Juta)	RM						Total RM (Rp Juta)
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
Badan Pengusahaan Batam									575.895	665.765	771.448	857.590	905.814	3.776.512	-	2.880.733	2.700.613	3.860.613	3.560.000	13.001.959	16.778.471
A	Prasarana dan Sarana Bidang Konektivitas Laut	Prioritas Nasional 3							-	30.000	59.450	226.800	467.189	783.439	-	140.930	-	-	-	140.930	924.369
1	Pengembangan Fasilitas Terminal Batu Ampar Indikator:								-	30.000	47.450	142.800	417.189	637.439	-	108.430	-	-	-	108.430	745.869
	1.a Jumlah kapasitas bongkar muat peti kemas (Dermaga Utara) (TEUs)		1.036.000 TEUs	580.000	620.000	722.000	795.000	1.036.000						-						-	-
	1.b Jumlah kapasitas bongkar muat kargo (Dermaga Selatan-Timur dan Magcobar)		1.500.000 Ton	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000		30.000	41.900	142.800	417.189	631.889		78.430				78.430	710.319
	1.c Pengembangan kantor pelabuhan		2 Unit	-	-	2 Unit	-	-			5.550			5.550		30.000				30.000	35.550
2	Pengembangan Fasilitas Terminal Curah Cair Kabil Indikator: Jumlah kapasitas bongkar muat barang di terminal Kabil (Ton)		3.650.000 Ton	-	-	-	3.650.000	3.650.000	-	-	12.000	60.000	50.000	122.000	-	-	-	-	-	-	122.000
3	Pengembangan Fasilitas Terminal Penumpang Domestik dan Internasional Indikator: Jumlah penumpang terminal domestik dan internasional (Org/Thn)		9.750.000 Org/Thn	8.500.000	8.750.000	9.000.000	9.250.000	9.750.000	-	-	-	24.000	-	24.000	-	32.500	-	-	-	32.500	56.500
B	Prasarana dan Sarana Bidang Konektivitas Udara								-	-	-	64.107	110.000	174.107	-	15.000	-	-	-	15.000	189.107
4	Pengembangan Fasilitas Penumpang Bandar Udara Indikator: Jumlah penumpang (Org/Thn)	Prioritas Nasional 3	9 Jt Org/Thn	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengembangan Fasilitas Kargo Bandar Udara Indikator: Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Thn)		9.600 Ton/Thn	-	-	-	-	9.600	-	-	-	-	-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	110.000
6	Pengembangan Fasilitas Kawasan Bandar Udara Indikator: Jumlah fasilitas kawasan yang ditingkatkan (Unit)		7 Unit	-	-	-	7	-	-	-	-	64.107	-	64.107	-	15.000	-	-	-	15.000	79.107
C	Prasarana dan Sarana Air Bersih								152.025	38.760	90.112	202.859	34.625	518.381	-	681.692	1.133.333	1.133.333	1.333.333	4.281.692	4.800.074
7	Pengembangan fasilitas air baku Indikator: Jumlah waduk baru yang terbangun (Unit)	Prioritas Nasional 3	1 Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133.333	1.133.333	1.133.333	3.400.000	3.400.000
8	Pengembangan fasilitas air minum Indikator: Tambahan volume air minum yang tersedia (liter/detik)		1.260 lpd	-	50	-	210	1000	-	23.035	-	112.314	25.394	160.743	-	-	-	-	200.000	200.000	360.743
9	Pengembangan fasilitas distribusi air minum Indikator: Jumlah panjang jaringan pipa distribusi terbangun (Km)		77,5 Km	43,6	10,2	23,7	-	-	116.532	15.725	55.000	-	-	187.257	-	431.944	-	-	-	431.944	619.202
10	Pengembangan fasilitas pengelolaan air minum Indikator: Jumlah fasilitas pengelolaan air minum (Unit)		4 Unit	1	-	1	1	1	35.492	-	35.112	90.545	9.232	170.381	-	249.748	-	-	-	249.748	420.129
D	Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan								-	53.500	-	82.572	54.000	190.072	-	-	-	-	-	-	190.072
11	Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional Indikator: Jumlah bangunan layanan RSBP Batam yang terbangun (Unit)	Prioritas Nasional 3	4 Unit	-	2	-	2	-	-	53.500	-	72.572	-	126.072						-	126.072
12	Peningkatan peralatan kesehatan berskala internasional Indikator: Jumlah peralatan kesehatan (Unit)		3 Unit	-	-	-	2	1	-	-	-	10.000	54.000	64.000						-	64.000
E	Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan								136.060	62.179	37.740	48.603	10.000	294.582	-	407.022	-	-	-	407.022	701.604
13	Pengembangan fasilitas kawasan olah raga dan pariwisata Indikator: Jumlah aset yang dikembangkan (Kawasan)	Prioritas Nasional 3	7 Kawasan	-	-	3	3	1	-	-	28.865	37.000	10.000	75.865	-	58.917	-	-	-	58.917	134.782
14	Pengembangan fasilitas kawasan pemukiman dan fasos Indikator: Jumlah kawasan yang terbangun (Unit)		359 Unit	350	9	-	-	-	136.060	62.179	-	-	-	198.239	-	264.450	-	-	-	264.450	462.689
15	Pengembangan fasilitas air limbah IPAL Indikator: Jumlah IPAL yang terbangun (Unit)		5 Unit	-	-	2	3	-	-	-	8.875	11.603	-	20.478	-	83.655	-	-	-	83.655	104.133
F	Parasarana dan Sarana Konektivitas Darat								287.810	481.325	584.146	232.649	230.000	1.815.931	-	1.636.089	1.567.279	2.727.279	2.226.667	8.157.314	9.973.246
16	Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) Indikator: Panjang trase lrt yang terbangun (Km)	Prioritas Nasional 3	11 Km	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pembangunan Flyover Indikator: Panjang Flyover yang terbangun (meter)		586 meter	-	-	63	293	230	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	200.000
18	Pembangunan Jalan Lingkar Indikator: Panjang jalan lingkar yang terbangun (Km)		18,4 Km	-	-	3,4	7,5	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.066.667	2.226.667	2.226.667	5.520.000	5.520.000
19	Peningkatan Jalan Transbarelang Indikator: Panjang jalan transbarelang yang terbangun (Km)		58,8 Km	-	-	29,4	29,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.613	500.613	-	1.001.225	1.001.225
20	Pembangunan, Peningkatan Jalan, Drainase dan Lasekap Median/Bundaran Indikator: Panjang jalan yang terbangun (Km)		73,3 Km	13,9	15,145	10,1	11,2	23	287.810	481.325	584.146	232.649	230.000	1.815.931	-	1.436.089	-	-	-	1.436.089	3.252.020

Lampiran 2 (b)
Matriks Kegiatan Infrastruktur Prioritas BP Batam Pendanaan APBN dan Non-APBN Tahun 2025-2029
(Usulan RPJMN 2025-2029)

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/Indikator	Penugasan Indikator	Target Total	Alokasi Non-APBN (Rp Juta)					Total Non-APBN (Rp Juta)	Total (Rp Juta)					Grand Total (Rp Juta)
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Pengusahaan Batam				164.978	539.978	539.978	2.283.514	4.487.575	8.016.024	740.873	4.086.476	4.012.039	7.001.716	8.953.389	24.794.494
A	Prasarana dan Sarana Bidang Konektivitas Laut			164.978	164.978	164.978	1.058.395	1.082.575	2.635.905	164.978	274.408	224.428	1.285.195	1.549.764	3.498.774
1	Pengembangan Fasilitas Terminal Batu Ampar <i>Indikator:</i>	Prioritas Nasional 3		164.978	164.978	164.978	1.058.395	1.082.575	2.635.905	164.978	241.908	212.428	1.201.195	1.499.764	3.320.274
	1.a Jumlah kapasitas bongkar muat peti kemas (Dermaga Utara) (TEUs)		1.036.000 TEUs	164.978	164.978	164.978	1.058.395	1.082.575	2.635.905	164.978	164.978	164.978	1.058.395	1.082.575	2.635.905
	1.b Jumlah kapasitas bongkar muat kargo (Dermaga Selatan-Timur dan Magcobar)		1.500.000 Ton	-	-	-	-	-	-	-	76.930	41.900	142.800	417.189	678.819
	1.c Pengembangan kantor pelabuhan		2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550	-	-	5.550
2	Pengembangan Fasilitas Terminal Curah Cair Kabil <i>Indikator: Jumlah kapasitas bongkar muat barang di terminal Kabil (Ton)</i>		3.650.000 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	60.000	50.000	122.000
3	Pengembangan Fasilitas Terminal Penumpang Domestik dan Internasional <i>Indikator: Jumlah penumpang terminal domestik dan internasional (Org/Thn)</i>		9.750.000 Org/Thn	-	-	-	-	-	-	-	32.500	-	24.000	-	56.500
B	Prasarana dan Sarana Bidang Konektivitas Udara			-	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000	-	390.000	375.000	439.107	485.000	1.689.107
4	Pengembangan Fasilitas Penumpang Bandar Udara <i>Indikator: Jumlah penumpang (Org/Thn)</i>	Prioritas Nasional 3	9 Jt Org/Thn	-	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000	-	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
5	Pengembangan Fasilitas Kargo Bandar Udara <i>Indikator: Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Thn)</i>		9.600 Ton/Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000	110.000
6	Pengembangan Fasilitas Kawasan Bandar Udara <i>Indikator: Jumlah fasilitas kawasan yang ditingkatkan (Unit)</i>		7 Unit	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	64.107	-	79.107
C	Prasarana dan Sarana Air Bersih			-	-	-	-	-	-	152.025	720.452	1.223.446	1.336.192	1.367.959	4.800.074
7	Pengembangan fasilitas air baku <i>Indikator: Jumlah waduk baru yang terbangun (Unit)</i>	Prioritas Nasional 3	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133.333	1.133.333	1.133.333	3.400.000
8	Pengembangan fasilitas air minum <i>Indikator: Tambahan volume air minum yang tersedia (liter/detik)</i>		1.260 lpd	-	-	-	-	-	-	-	23.035	-	112.314	225.394	360.743
9	Pengembangan fasilitas distribusi air minum <i>Indikator: Jumlah panjang jaringan pipa distribusi terbangun (Km)</i>		77,5 Km	-	-	-	-	-	-	116.532	447.669	55.000	-	-	619.202
10	Pengembangan fasilitas pengelolaan air minum <i>Indikator: Jumlah fasilitas pengelolaan air minum (Unit)</i>		4 Unit	-	-	-	-	-	-	35.492	249.748	35.112	90.545	9.232	420.129
D	Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan			-	-	-	-	-	-	-	53.500	-	82.572	54.000	190.072
11	Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional <i>Indikator: Jumlah bangunan layanan RSBP Batam yang terbangun (Unit)</i>	Prioritas Nasional 3	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	53.500	-	72.572	-	126.072
12	Peningkatan peralatan kesehatan berskala internasional <i>Indikator: Jumlah peralatan kesehatan (Unit)</i>		3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	54.000	64.000
E	Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan			-	-	-	-	-	-	136.060	469.201	37.740	48.603	10.000	701.604
13	Pengembangan fasilitas kawasan olah raga dan pariwisata <i>Indikator: Jumlah aset yang dikembangkan (Kawasan)</i>	Prioritas Nasional 3	7 Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	58.917	28.865	37.000	10.000	134.782
14	Pengembangan fasilitas kawasan pemukiman dan fasos <i>Indikator: Jumlah kawasan yang terbangun (Unit)</i>		359 Unit	-	-	-	-	-	-	136.060	326.629	-	-	-	462.689
15	Pengembangan fasilitas air limbah IPAL <i>Indikator: Jumlah IPAL yang terbangun (Unit)</i>		5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	83.655	8.875	11.603	-	104.133
F	Parasarana dan Sarana Konektivitas Darat			-	-	-	850.119	3.030.000	3.880.119	287.810	2.117.414	2.151.426	3.810.047	5.486.667	13.853.364
16	Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) <i>Indikator: Panjang trase lrt yang terbangun (Km)</i>	Prioritas Nasional 3	11 Km	-	-	-	850.000	3.030.000	3.880.000	-	-	-	850.000	3.030.000	3.880.000
17	Pembangunan Flyover <i>Indikator: Panjang Flyover yang terbangun (meter)</i>		586 meter	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000
18	Pembangunan Jalan Lingkar <i>Indikator: Panjang jalan lingkar yang terbangun (Km)</i>		18,4 Km	-	-	-	-	-	-	-	-	1.066.667	2.226.667	2.226.667	5.520.000
19	Peningkatan Jalan Transbarelang <i>Indikator: Panjang jalan transbarelang yang terbangun (Km)</i>		58,8 Km	-	-	-	-	-	-	-	-	500.613	500.613	-	1.001.225
20	Pembangunan, Peningkatan Jalan, Drainase dan Lasekap Median/Bundaran <i>Indikator: Panjang jalan yang terbangun (Km)</i>		73,3 Km	-	-	-	119	-	119	287.810	1.917.414	584.146	232.768	230.000	3.252.139

Lampiran 3

Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian (Tahun)
1	Pengaturan pembentukan Dewan Kawasan	Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 masa tugas Dewan Kawasan KPBPB Batam telah berakhir sejak tanggal 21 Februari 2021 dan belum ada Pembentukan Dewan Kawasan yang baru	Internal: - Biro Hukum Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian	2025
2	Pengaturan status kelembagaan	Belum adanya pengaturan status kelembagaan BP Batam yang menegaskan BP Batam sebagai instansi K/L, sedangkan pola pengelolaan keuangan mengikuti peraturan BLU	Internal: - Biro Hukum Eksternal: - Kementerian PAN dan RB - Kementerian Setneg	2026
3	Pengaturan status kepegawaian	Belum adanya pengaturan status kepegawaian BP Batam yang menjadi monostatus. Saat ini pegawai PNS di BP Batam merupakan status diperbantukan atau dipekerjakan dari berbagai kementerian/ lembaga lain, sehingga BP Batam perlu memiliki nomenklatur sendiri sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 pegawai BP Batam terdiri dari PNS dan Non PNS, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 pegawai BP Batam dapat berasal dari ASN, Non ASN dan Tenaga Profesional, sehingga perlu aturan khusus berupa Peraturan Pemerintah	Internal: - Biro Sumber Daya Manusia - Biro Hukum Eksternal: - Kementerian PAN dan RB - Kementerian Setneg	2027
4	Pengaturan sinkronisasi perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025	Adanya perizinan sesuai PP 41 Tahun 2021 yang saat ini masih dikeluarkan oleh instansi lain yaitu di bidang Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Internal: - Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pusat Perencanaan Program Strategis Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian Setneg - Kementerian Kehutanan - Kementerian KKP	2025
5	Pengaturan percepatan perizinan investasi	Adanya perizinan yang masih dikeluarkan dari instansi pusat dan daerah seperti Amdal oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Izin lingkungan dan Persetujuan Bangunan dan Gedung oleh Pemerintah Kota agar menjadi kewenangan BP Batam kembali	Internal: - Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pusat Perencanaan Program Strategis Eksternal: - Kementerian Lingkungan Hidup - Pemerintah Kota Batam	2025
6	Pengaturan percepatan penerbitan status HPL di Pulau Rempang dan Pulau Galang	Belum adanya pengaturan untuk percepatan penerbitan HPL Rempang dan Galang oleh Kementerian ATR/BPN sehingga berdampak pada rencana investasi pengembangan di PSN Rempang Eco City dan PSN Kawasan Industri Wiraraja Galang	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Biro Hukum Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian ATR/BPN - Kementerian PPN/Bappenas	2025
7	Pengaturan Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang masuk dalam KPBPB Batam	Adanya potensi pasar transshipment sebesar 70 juta TEUs di perairan selat Philips yang dapat ditarik ke Indonesia, namun P. Tanjung Sauh dan P. Ngenang belum termasuk dalam wilayah KPBPB Batam, sehingga perlu ditetapkan sebagai bagian dari wilayah kerja KPBPB Batam dan menetapkan sebagai pelabuhan HUB Transshipment untuk wilayah Indonesia Bagian barat	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Biro Hukum Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian ATR/BPN - Kementerian PPN/Bappenas	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian (Tahun)
8	Pengaturan keluar masuk barang kontainer khusus di Wilayah KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan khusus keluar masuk barang kontainer di wilayah KPBPB Batam antara Kementerian Keuangan Cq. Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan BP Batam	Internal: - Direktorat Pengelolaan Kepelebuhanan - Direktorat Lalin Barang - Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Keuangan - Kementerian Perdagangan	2025
9	Pengaturan Rencana Rinci (RRP) khususnya 5 Wilayah Penataan dan Pengembangan	Belum adanya pengaturan RRP yang menjadi Kawasan Prioritas Pembangunan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 dan mempedomani Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK yang selanjutnya menjadi acuan/pedoman tata ruang di KPBPBP Batam	Internal: - Pusat Perencanaan Program Strategis - Direktorat Pengelolaan Lahan - Biro Hukum Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Kementerian ATR/BPN - Kementerian PPN/Bappenas	2025
10	Pengaturan pengelolaan prasarana jalan di KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan pemeliharaan jalan di wilayah KPBPB Batam yang merupakan aset BP Batam, sehingga diperlukan peraturan terkait potensi PNBP terhadap penggunaan jalan melalui pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pajak Penerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Kota.	Internal: - Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis - Direktorat Pengembangan KPBPB dan KEK - Direktorat Pembangunan Infrastruktur - Biro Hukum Eksternal: - Pemerintah Provinsi Kepri - Pemerintah Kota Batam	2026
11	Pengaturan penindakan bangunan dan pemanfaatan hutan tidak berizin di wilayah kerja KPBPB Batam	Belum adanya pengaturan penindakan terhadap bangunan tidak berizin dan pemanfaatan catchment area oleh Direktorat Pengamanan Aset BP Batam	Internal: - Direktorat Pengamanan Aset - Direktorat Pelayanan Pertanahan - Direktorat Infrastruktur Kawasan - Biro Hukum dan Organisasi Eksternal: - Kepolisian Daerah dan Kota - Pemerintah Kota Batam	2026
12	Pengaturan alokasi tanah yang efektif sesuai perencanaan pembangunan kawasan Bareleng untuk peningkatan investasi	Belum adanya pengaturan penyelesaian 7 ribu hektar lahan menganggur dari 700 proyek yang mangkrak yang hingga saat ini masih menghambat investasi di Batam. Selanjutnya perlu regulasi terkait pembangunan pemukiman vertikal dan membatasi rumah tapak.	Internal: - Direktorat Pelayanan Pertanahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK - Biro Hukum dan Organisasi Eksternal: - Kementerian ATR/BPN - Pemerintah Kota Batam	2027
13	Pengaturan hubungan kerja antara BP Batam dengan Pemko Batam	Belum adanya pengaturan hubungan unit kerja antara BP Batam dengan Pemerintah Kota terkait bidang Pariwisata dan PBK, Kehutanan, Perikanan di Kawasan DAM	Internal: - Biro Hukum - Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis Eksternal: - Kemenko Bidang Perekonomian - Pemerintah Kota Batam	2028



RENCANA STRATEGIS BP BATAM

2025-2029

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



BPBATAM.GO.ID

KANTOR BATAM
JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE,
PULAU BATAM, KEPULAUAN RIAU, INDONESIA
(+62) 778 - 462 047 / 462 048
HUMAS@BPBATAM.GO.ID

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 24, JAKARTA TIMUR, DKI
JAKARTA, INDONESIA
+6221-8580009 / 8580010
KP.JKT@BPBATAM.GO.ID

KEPALA URUSAN EKONOMI INTERNASIONAL BP
BATAM DI SINGAPURA
MICHAEL GOUTAMA
+65-9699 1000
MGOUTAMA@NEX2MAIL.COM